

**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK  
DI TINGKAT LOKAL**

**(STUDI KASUS: PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KOTA SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana  
Ilmu Politik (S.IP)**



Oleh:

**CANTIKA KURNIAHATI**

**1706016048**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan FISIP  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamualikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Cantika Kurniahati  
NIM : 1706016048  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : "Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang"

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

& Tatatulis



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 196805051995031003

**SKRIPSI**  
**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK**  
**DI TINGKAT LOKAL**  
**(Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang)**

Disusun Oleh

**Cantika Kurniahati**

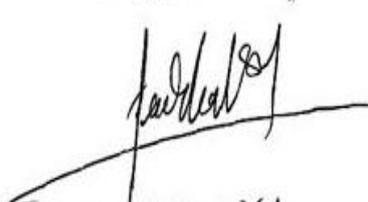
1706016048

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua  
  
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP. 196805051995031003

Penguji 1  
  
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP. 197809302003121001

Penguji 2  
  
Muhammad Mahsun.M.A  
NIP. 198511182016011901

Pembimbing  
  
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP. 196805051995031003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2022



Cantika Kurniahati

1706016048

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul “PELEMBAGAAN PARTAI DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Nur Syamsuddin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Rofiq, M.Si. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan, semangat serta motivasi agar penyusunan skripsi ini dapat segera selesai sesuai waktu dan berjalan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat

mengimplementasikan ilmu yang diberikan kedalam penyusunan penulisan skripsi.

7. Seluruh Pengurus Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Masyarakat yang telah bersedia untuk di wawancarai.
9. Bapak dan Ibuku tersayang serta kakakku yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman- teman S1 Ilmu Politik-B UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, pertolongan, dan kebaikan semua pihak mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tersayang serta keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan untuk:

Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.

## **MOTTO**

*The secret of getting ahead is getting started.*

Rahasia untuk bisa maju adalah dengan memulai

(Mark Twain)

## ABSTRAK

Partai politik adalah sarana bagi masyarakat menyalurkan pendapat kepada pemerintah, untuk itu partai politik perlu mendapatkan kepercayaan serta keyakinan dari masyarakat. Untuk mendapatkan hal tersebut dari masyarakat, partai politik memerlukan pelembagaan partai yang baik. Ketika proses pelembagaan partai politik di dalam suatu partai sudah mapan dan baik, akan menghasilkan dampak positif dalam berpolitik. Proses pelembagaan partai dilihat dari proses pematangan struktur maupun kultur didalam partai itu sendiri.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. John W. Creswell menjelaskan pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada suatu kasus melalui pengumpulan data detail yang mendalam dan melibatkan beragam sumber informan. Penggunaan metode ini bertujuan agar penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pelembagaan partai politik di tingkat lokal khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan sumber informasi dokumen terkait Pelembagaan Partai Politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tiap dimensi pelembagaan partai yang diukur berdasarkan teori dari Randall dan Svasand. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu mengedepankan kerbersamaan dan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengedepankan ideologi partai, baik bagi anggota, pengurus, hingga basis pendukung partai yang menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu partai yang solid. Ketiga, kemandirian pengambilan keputusan dan kemandirian ekonomi berjalan dengan baik karena selalu mengedepankan gotong royong. Keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimata masyarakat merupakan partai yang dapat terkenal karena tokoh didalamnya.

Pelembagaan partai di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur kemampuan suatu partai. Karena bagaimanapun keberhasilan partai di tingkat nasional tidak bisa lepas dari peran kepengurusan dibawahnya. Kepengurusan di tingkat yang lebih rendah menjalankan partai dengan peraturan yang dibuat di pusat yang kemudian dapat menjadi cerminan untuk mempertahankan serta memperbaiki partai menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Partai politik, Pelembagaan partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang.

## ABSTRACT

*Political parties are a means for citizen to channel their opinions to the government, for that reason political parties need the trust of the citizen. To get a trust from the citizen, Political parties require good party institutionalization. When a political parties has a good party institutionalization process, will have a positive impact on politics in general. The process of party institutionalization can be seen as a process of strengthening the party's structure and culture.*

*This study is a sort of field research that use qualitative methodologies and using case study approach. According to John W. Creswell, the case study approach is one that investigates the real life of a case by collecting in-depth detailed data and involving various sources of informants. The purpose of using this method are to direct attention to how the process of institutionalizing political parties at the local level, particularly at Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Semarang City. The data for this research were obtained from in-depth interviews and document information sources related to the Institutionalization of Political Parties in the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in Semarang City.*

*The results of this study explain how Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan already institutionalized in every dimension of party institutionalization as measured by the theory of Randall and Svasand. First, within the party's internal democracy, the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan always prioritizes togetherness and uses a consensus deliberation mechanism in returning decisions. Second, put forward party ideology, both for members, administrators, to the party's support base which makes the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a solid party. Third, independence in decision-making and economic independence are going well because they always prioritize mutual cooperation. Fourth, in the eyes of society, the Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan is a party that can be famous because of the figures in it.*

*The institutionalization of parties at the local level can be used as a measure of the stability of a party. Because after all the success of the party at the national level cannot be separated from the role of the management under it. Management at lower levels runs the party with regulations made at the center which can then be a reflection for maintaining and improving the party for the better.*

**Keywords:** *Political parties, Party institutionalization, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in Semarang City.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
<b>PARTAI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PARTAI</b> .....	15
A. Partai Politik .....	15
1. Asal mula partai politik .....	15
2. Pengertian Partai Politik .....	16
3. Fungsi partai politik .....	17
B. Pelembagaan Partai .....	19
1. Pengertian Pelembagaan Partai .....	19
2. Dimensi Pelembagaan Partai .....	20
<b>BAB III</b> .....	23
<b>GAMBARAN UMUM PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG</b> .....	23
A. Gambaran umum Kota Semarang .....	23

1. Kondisi Geografis.....	23
2. Kondisi Topografis.....	24
3. Kondisi Demografis.....	25
B. Profil PDI Perjuangan .....	28
1. Sejarah PDI Perjuangan .....	28
2. Makna Lambang.....	30
3. Ideologi PDI Perjuangan.....	31
4. Visi dan Misi PDI Perjuangan.....	31
C. Dewan Perwakilan Cabang Kota Semarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>ANALISIS DERAJAT KESISTEMAN DAN IDENTITAS NILAI PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG .....</b>	<b>39</b>
A. Derajat Kesisteman.....	39
1. Demokrasi Internal .....	39
2. Keutuhan Organisasi.....	40
3. Sistem Keanggotaan dan Kaderisasi.....	41
B. Identitas Nilai .....	47
1. Basis Pendukung Partai .....	47
2. Klientisme Dalam Partai .....	50
C. Derajat Otonomi .....	51
1. Kemandirian Dalam Pengambilan Keputusan .....	51
2. Kemandirian Keuangan.....	54
D. Derajat Citra Publik atau Reifikasi ( <i>reification</i> ) .....	55
1. Kiprah Partai Dalam Politik Lokal .....	56
2. Kiprah Partai Dalam Masyarakat .....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Kursi PDI Perjuangan pada Pemilu .....	2
Tabel 2. 1 Dimensi Pelembagaan Partai Politik.....	19
Tabel 3. 1 Letak Geografis Kota Semarang.....	22
Tabel 3. 2 Ketinggian Daerah di Kota Semarang .....	23
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang .....	25
Tabel 3. 4 Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang 2020 .....	26
Tabel 3. 5 Jumlah Penganut Tiap Agama di Kota Semarang .....	26
Tabel 3. 6 Kepengurusan tingkat Dewan Perwakilan Cabang.....	34
Tabel 3. 7 Kepengurusan tingkat Perwakilan Anak Cabang .....	34
Tabel 3. 8 Kepengurusan tingkat Ranting .....	34
Tabel 3. 9 Kepengurusan tingkat Anak Ranting .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Semarang .....	24
Gambar 3. 2 Lambang PDI Perjuangan.....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran partai politik salah satunya berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemerintah, maka partai politik harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi politik. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, tiap partai membutuhkan pelembagaan partai yang baik, selain untuk mendapatkan kepercayaan pelembagaan partai dapat mempengaruhi bagaimana hasil suara maupun bagaimana partai tersebut dipandang oleh masyarakat. Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002, 12) Pelembagaan partai politik merupakan proses memantapkan partai politik dilihat dari segi struktur dan kultur sebagai upaya untuk menentukan perilaku, sikap, dan budaya.

Randall dan Lars (2002, 17-23) menyebutkan proses pelembagaan dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek; internal-eksternal dan struktural-kultural. Aspek-aspek ini apabila disilangkan akan menghasilkan empat dimensi pelembagaan, yakni: derajat kesisteman, identitas nilai, otonomi, dan citra publik. Derajat kesisteman (*systemness*) merupakan proses dimana partai melaksanakan fungsi partai politik yang sesuai dengan AD-ART yang dirumuskan sehingga menghasilkan kaidah prosedur yang bertujuan sebagai penuntun perilaku dalam pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik.

Identitas nilai (*values infusion*) suatu partai ini berkaitan dengan pandangan kebijakan dan tindakan partai politik yang sesuai dengan ideologi partai, yaitu bagaimana pola dan arah kebijakannya diperjuangkan bersama oleh partai politik dan basis sosial pendukungnya. Derajat otonomi yang dimaksud adalah otonomi dalam pembuatan keputusan (*desicional autonomy*), derajat otonomi berarti suatu partai tidak memiliki hubungan dengan tokoh diluar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu seperti seorang penguasa, pemerintah, maupun mendapatkan dana-dana yang berasal dari pengusaha, suatu lembaga luar dan sumber dukungan massa. Citra publik atau Reifikasi (*reification*), berkaitan dengan sejauh mana partai ada dalam imajinasi masyarakat. Jika suatu partai sudah terkenal dan tertanam di benak

masyarakat, maka pemilih akan menyesuaikan harapan dan ekspektasinya sesuai dengan partai tersebut.

Salah satu partai politik di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan dan dukungan besar dari masyarakat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Tentu saja PDI Perjuangan mengalami proses pembentukan pelembagaan yang dapat diterapkan didalamnya, sehingga partai PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang masih bertahan sampai sekarang. Ini dibuktikan dengan kemenangan PDI Perjuangan pada beberapa pemilihan. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU, pada Pemilu Legislatif 2014. PDI Perjuangan memenangkan suara terbanyak baik pada tingkat DPRD dan DPR RI.

Tahun	DPR RI	DPRD	DPRD I
2014	109	27	15
2019	128	42	19

*Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Kursi PDI Perjuangan pada Pemilu*

PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014 mendapatkan total 23.681.471 suara atau 18,95% dari total suara. Kemudian pada 2019 mendapatkan 27.053.961 suara atau 19,33% dari total suara. Terlihat adanya kenaikan dari jumlah suara yang didapatkan, merupakan salah satu bukti bahwa PDI Perjuangan berhasil menarik perhatian masyarakat dan mendapatkan kepercayaan yang sekaligus mendapatkan dukungan kuat. Dengan jumlah suara didapatkan, maka PDI Perjuangan berhasil mendapatkan jumlah kursi yaitu: 109 kursi pada tahun 2014, dan 128 kursi pada tahun 2019. Pada tingkat DPRD Provinsi Jawa tengah PDI Perjuangan mendapatkan 27 kursi dari kuota 100 kursi, sementara untuk DPRD Jateng Dapil I Kota Semarang mendapatkan 15 kursi. Kemenangan PDIP terus berlanjut hingga ke Pemilu Serentak 2019, terjadi kenaikan signifikan apabila dilihat dari jumlah kursi yang didapatkan. Dari 27 kursi, menjadi 42 kursi untuk kuota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk jumlah kursi DPRD Jateng Dapil I Kota Semarang mendapatkan kenaikan kursi dari 15 kursi menjadi 19 kursi.

Pada Pilwakot atau Pilkada 2020 PDI Perjuangan juga membuktikan kekuatannya maupun kekuatan pendukungnya. Terjadi peristiwa melawan kotak kosong, yang berarti pasangan calon tidak melawan pasangan calon lain karena tidak ada yang mengajukan diri, sehingga pasangan calon tersebut harus melawan kotak kosong. Hal ini terjadi dikarenakan pasangan yang diajukan oleh PDI Perjuangan yaitu Hendi Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu mendapatkan dukungan penuh dari pemilik kursi di DPRD Kota Semarang, seluruh partai memilih untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan sehingga tidak mengajukan calonnya. Untuk memenangkan kotak kosong, pasangan calon harus mendapatkan lebih dari 50% suara dari total jumlah suara. Dengan kondisi ditengah pandemi, warga Kota Semarang tetap antusias mendukung pasangan Hendi-Ita. Hingga membawa kemenangan bagi pasangan tersebut. Dari data yang didapatkan pasangan ini berhasil memenangkan kotak kosong dengan hasil 91,56% dan kotak kosong hanya mendapatkan 8,44%, sebanyak 716,693 warga memilih pasangan ini. Hal ini membuktikan bahwa warga yang memilih untuk percaya pada PDI Perjuangan sangatlah besar dan hal ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan berhasil menjaga kesuksesannya.

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis menjadikan DPC Partai PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai sumber penelitian dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana sistem dan proses pelebagaan partai politik di dalam Partai PDI Perjuangan di tingkat lokal yaitu setingkat Kota Semarang dengan acuan empat dimensi pelebagaan partai oleh Randall dan Lars. Berdasarkan ketertarikan penulis terhadap kekuatan partai PDIP di Kota Semarang, maka penulis melaksanakan penelitian ini dan mengangkat judul “Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelebagaan partai PDI Perjuangan di Kota Semarang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelebagaan partai politik PDI Perjuangan pada tingkat lokal dengan lokasi yaitu Kota Semarang.

### D. Manfaat Penelitian

Setelah menentukan apa yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis dan juga secara praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis mengharapkan nantinya penelitian ini berguna sebagai sumber referensi dan memberikan wawasan keilmuwan mengenai teori pelebagaan partai politik.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teori pelebagaan partai politik serta menjadikan Partai PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai gambaran penerapan teori pelebagaan partai tersebut.
- b. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan pengetahuan seputar pelebagaan partai politik di tingkat lokal khususnya Partai PDI Perjuangan Kota Semarang.

### E. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik dan fokus pada penelitian ini sebagai kajian awal sebelum memulai menulis penelitian. Berikut penelitian-penelitian yang penulis gunakan sebagai rujukan, diantaranya adalah:

1. *Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal 2014-2019*. Skripsi yang ditulis oleh Fachri Setiadi (2019) menjelaskan mengenai bagaimana pelebagaan partai politik yang ada di PKB Kabupaten Kendal dan juga menjelaskan apa saja kendala yang ada di dalam pelebagaan partai PKB ini. Hasil dari penelitian terdahulu

mengatakan bahwa pelebagaan partai politik PKB Kab Kendal cukup baik, tetapi masih ada beberapa catatan yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan dan menjaga kelembagaan partai PKB. Persamaan yang ada diantara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah, fokus dari kedua penelitian itu sendiri membahas mengenai pelebagaan partai politik, bagaimana penerapan dan jalannya pelebagaan partai politik didalam partai politik yang diteliti. Sedangkan perbedaan diantara penelitian yang penulis ajukan dengan penelitian yang ditulis oleh fachri ini, terletak pada partai politik yang diteliti dan lokasi penelitian. Penulis meneliti pelebagaan partai politik yang ada di PDIP Kota Semarang, sedangkan penelitian terdahulu meneliti pelebagaan partai politik yang ada di PKB Kab Kendal.

2. *Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Ubaningrum dalam Partai Demokrat)*. Skripsi yang ditulis oleh Rowdotusya'adah (2018) menjelaskan bagaimana jalannya pelebagaan partai didalam Partai Demokrat. Partai Demokrat berjalan tidak telebaga sehingga berdampak seperti kemunculan faksi atau bagian kecil dalam partai. Karakter dari Partai Demokrat yang dikenal sebagai partai personalistik menjadi salah satu penyebab lemahnya pelebagaan partai. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis ajukan terletak pada fokus penelitian, yaitu pelebagaan partai politik. Sedangkan perbedaanya terletak pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada sebab dari kemunculan faksi intra-partai yang terjadi didalam Partai Demokrat yang ternyata disebabkan oleh pelebagaan partainya sendiri.
3. *Pelebagaan Politik PDIP Jateng*. Tesis ini ditulis oleh Budi Prayitno (2009). Baik penelitian terdahulu dan penelitian penulis, menjadikan Partai PDI Perjuangan sebagai objek penelitian. Topik yang dibahas juga sama, yakni pelebagaan politik. Namun ada perbedaan diantara kedua penelitian ini, terdapat pada lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu menjadikan PDIP ditingkat Jawa Tengah sebagai objek penelitian,

sedangkan penulis hanya ditingkat Kota Semarang. Selain itu, penelitian terdahulu, berfokus pada elemen-elemen apa saja yang dapat diperbaiki didalam pelebagaan partai PDIP Jateng.

4. *Pelebagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019*. Jurnal karya Nanang Suryana, Ari Ganjar Adriansyah, Firman Manan (2020) ini meneliti mengenai bagaimana jalannya pelebagaan partai PSI di Kota Bandung. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelebagaan partai PSI di Kota Bandung ini masih berjalan dinamis atau terus berkembang menyesuaikan diri dengan keadaan, sebagai partai yang terbilang baru PSI berusaha memberikan gagasan politik yang lebih baru dari partai politik lama. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis ajukan yaitu ada pada teori pelebagaan partai politik. Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu ini melihat pelebagaan partai pada Partai PSI, sedangkan penulis menjadikan Partai PDIP sebagai objek penelitian.
5. *Pelebagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh)*. Penelitian berbentuk jurnal ini ditulis oleh Ubaidullah Mardaya, M.A. dan Ardiansyah, S. IP., M. A. (2019). Penelitian terdahulu ini berfokus pada mengapa kehadiran Partai PKPI kurang dirasakan ditengah masyarakat, yang ternyata dikarenakan kurangnya pelebagaan partai didalam Partai PKPI tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kurangnya eksistensi Partai PKPI ditengah masyarakat. Terdapat kesamaan diantara penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian terdahulu, yakni pada penggunaan teori. Kedua penelitian menjadikan teori pelebagaan partai politik sebagai fokus utama. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada, penelitian terdahulu menjadikan Partai PKPI Aceh sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menjadikan Partai PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai objek penelitian.

6. *Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Konstelasi Politik Etnis Tionghoa*. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Dina Fadiyah (2017). Penelitian ini ingin melihat bagaimana potret bagaimana suatu partai politik menyikapi dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang digunakan, meski anggota partai tersebut sebagian beretnis suatu etnis tertentu. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis ajukan terdapat pada bagaimana pelembagaan partai politik di dalam partai PDI Perjuangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada bagaimana konstelasi etnis Tionghoa mempengaruhi jalannya pelembagaan partai di dalam PDI Perjuangan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana sistem pelembagaan politik yang ada didalam PDI Perjuangan dan apa dampaknya.
7. *Pelembagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Agung Pratama Putra (2021). Penelitian ini menguraikan pengaruh pelembagaan partai politik islam terhadap hasil suara pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Palembang. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis ajukan terdapat pada penggunaan teori pelembagaan partai politik. Dan perbedaannya yaitu penelitian yang penulis ajukan menggunakan pelembagaan partai sebagai fokus utama, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pelembagaan partai sebagai pembanding diantara kedua partai yaitu PKS dan PPP yang diteliti oleh penulis pada penelitian terdahulu.
8. *Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur*. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Ahmad Zaki Fadlurrohman (2017). Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai peran pelembagaan partai melalui praktek pemilu serentak 2015 dan *problem* apa saja yang kemudian muncul dalam pilkada tersebut. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis ajukan terdapat pada

penggunaan teori pelebagaan partai, yang menjadi pembeda diantara kedua penelitian ini adalah penggunaan teori pelebagaan partai itu sendiri. Pada penelitian yang penulis ajukan, pelebagaan partai menjadi fokus utama yang akan diteliti. Sedangkan pada penelitian terdahulu, pelebagaan politik hanya sebagai perantara untuk melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelebagaan partai itu sendiri yaitu lahirnya berbagai fenomena ditengah pilkada serentak di Jawa Timur.

9. *Pelebagaan Politik Partai*. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Ayu Galuh Mangestuti (2012). Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai berbagai konflik yang dialami oleh partai Demokrat didalam Pemilukada Surabaya tahun 2010. Persamaan yang ada diantara penelitian yang penulis ajukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada penggunaan teori pelebagaan partai. Akan tetapi, penggunaan teori pelebagaan partai pada penelitian ini hanya sebagai sumber dari konflik yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan, menggunakan teori pelebagaan partai sebagai fokus utama.
10. *Problematika Kelebagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi*. Penelitian ini membahas mengenai fungsi representasi pada suatu partai politik, dan menghasilkan data bahwa kelebagaan partai politik mempengaruhi representasi pada suatu partai. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis ajukan adalah, penggunaan teori pelebagaan partai. Perbedaannya adalah, penggunaan pelebagaan teori pelebagaan partai pada penelitian terdahulu adalah sebagai tolak ukur apakah fungsi representasi berjalan pada suatu partai. Sedangkan penelitian penulis menjadikan pelebagaan partai sebagai fokus utama.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu ilmu mengenai jalan yang wajib dilalui agar suatu paham dapat tercapai. Jalan ini wajib ditetapkan dengan bertanggung jawab baik ilmiah dan data yang didapatkan agar pemahaman yang diperoleh kebenarannya dapat dipercaya.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong 2002, 5).

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Jonh W. Creswell (2015, 135) pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada suatu kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data detail yang mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi seperti, observasi, wawancara, bahan audio visual dan berbagai dokumen terkait.

Penerapan studi kasus dalam Penelitian ini adalah sebagai acuan bahwa nantinya penelitian ini harus sesuai dengan hasil data yang didapatkan melalui pemahaman secara mendalam dan apa adanya sesuai dengan bagaimana pelebagaan partai yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang.

## 2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2011, 11) adalah pemaknaan dari konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pelebagaan partai politik

Randall & Lars (2002, 12) melihat pelebagaan partai melalui dua aspek yakni kultural-struktural dan internal-eksternal, yang kemudian dari aspek aspek tersebut apabila disilangkan akan melahirkan empat dimensi pelebagaan yakni: derajat kesisteman (*systemness*), derajat identitas nilai (*values infursion*), derajat otonomi (*desicional autonomy*), dan derajat citra publik/reifikasi (*reification*).

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian membutuhkan sumber data yang valid sehingga hasil dari setiap penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sumber data sangatlah penting bagi suatu penelitian. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder (Purhantara 2010, 79)

#### a. Data Primer

Purhantara (2010, 79) menjelaskan bahwa data primer adalah:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan

Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan mengunjungi pihak terkait, yaitu pihak DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, yang terdiri dari Ketua Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Ketua BSPN PDI Perjuangan Kota Semarang, Bendaraha PAC Pedurungan PDI Perjuangan, Ketua BMI PDI Perjuangan Kota Semarang. Selain dari pihak DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, wawancara juga dilaksanakan bersama masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Purhantara (2010, 79) menjelaskan bahwa data sekunder adalah:

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisas, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, sumber sekunder didapatkan dari sumber informasi dokumen, sumber informasi kepustakaan, dan sumber informasi lapangan. Sumber informasi dokumen mencakup semua jenis informasi tentang dokumen, baik yang dipublikasikan maupun tidak, berupa laporan, statistik, surat dinas, catatan harian, dan sejenisnya. Sumber informasi bibliografi adalah banyak jenis bahan bacaan yang mengumpulkan berbagai informasi dalam berbagai mata pelajaran ilmiah. Karena jenis informasi ini biasanya dikumpulkan dari partisipan dalam item penelitian, sumber terkadang disebut

sebagai sumber informasi pribadi. Sumber informasi lapangan adalah informasi yang dikumpulkan dari informasi pribadi (Mohamad 2010, 42-45).

Sumber informasi dokumen pada penelitian ini menggunakan data-data terkait seputar Pelembagaan Partai Politik di PDIP Kota Semarang. Selanjutnya, sumber informasi kepustakaan didapatkan melalui sumber bacaan berupa buku dan *literature* lainnya. Yang terakhir sumber informasi lapangan didapatkan melalui keterangan terkait dari informan yang bersangkutan dengan PDI Perjuangan Kota Semarang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu (Ulber 2009, 208). Untuk mendapatkan data empiris yang valid, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

##### a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2013, 194). Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara tersrukur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak tersruktur.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber 2009, 313). Wawancara akan dilakukan dengan mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono 2013, 329). Dokumentasi pada penelitian ini akan didapatkan melalui data-data atau arsip-arsip yang diberikan oleh anggota DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, seperti AD ART; laporan hasil pemilu dan pilkada; susunan kepengurusan dan dokumen-dokumen lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data lebih dari sekedar proses menyamakan analisis data dengan pendekatan untuk menganalisis data teks dan gambar, akan tetapi proses analisis juga melibatkan pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada *database*, pengodean, pengorganisasian tema, penyajian data, dan penyusunan penafsiran data (Creswell 2015, 250). Pada penelitian menggunakan metode kualitatif analisis datanya dilakukan dengan menganalisis data-data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka, analisis data pada bentuk kualitatif dilakukan berdasarkan data empiris yang berisi data dengan wujud perkataan yang bukan merupakan rangkaian angka dan tidak bisa disusun dalam suatu kategori atau struktur klarifikasi.

Data-data yang didapatkan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil sesuai rumusan masalah dalam suatu penelitian. Ada tiga tahap teknik analisis data menurut Miles & Huberman (1992, 16) yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Untuk memperoleh dan memverifikasi kesimpulan akhir, data harus dipertajam, diklasifikasikan, diarahkan, dibuang, dan diatur melalui proses reduksi data.

### 2. Penyajian Data

Untuk memungkinkan potensi membuat penilaian dan mengambil tindakan, data yang telah direduksi kemudian ditampilkan sebagai kumpulan informasi terstruktur. Untuk memastikan bahwa data yang disajikan merupakan gambaran untuk menjawab setiap permasalahan yang ada,

penyajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang dibingkai sebagai pertanyaan penelitian.

### 3. Menarik Kesimpulan

Selama penelitian berlangsung, kesimpulan masih terus ditarik. Sebab, menurut Miles & Huberman, analisis data merupakan proses interaktif yang silih berganti antara operasi reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan selama periode penelitian. Hasil dapat diverifikasi, dan kesimpulan kemudian dapat diperoleh dan disajikan secara naratif.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran menyeluruh dari isi skripsi ini secara garis besarnya. Skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, adapun sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

### BAB I           Pendahuluan

Bab ini membahas mengapa penulis menulis penelitian ini yang di jelaskan di dalam latar belakang lalu dirumuskan menjadi rumusan masalah untuk dikaji. Setelah itu bab ini juga membahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian pendekatan penelitian dan metode apa yang digunakan penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

### BAB II           Teori Partai Politik dan Pelembagaan Partai

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan teori-teori yang telah digunakan pada proposal skripsi ini. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini akan dikaji lebih dalam, sebagai bahan untuk menganalisis data-data yang didapatkan.

### BAB III          Gambaran Umum PDI Perjuangan Kota Semarang

Bab ini berisi penjelasan mengenai lokasi penelitian yang berada pada Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Penulis akan menjelaskan profil Kota Semarang baik struktur sosial, ekonomi, budaya, hingga demografinya. Penulis juga akan menjelaskan profil DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mulai dari struktur organisasi, tugas, fungsi dan lain-lain.

- BAB IV** Analisis Pelembagaan Partai PDI Perjuangan Kota Semarang
- Bab ini berisikan analisis mengenai pelembagaan partai didalam PDI Perjuangan Kota Semarang dengan penerapan teori pelembagaan partai oleh Randall & Lars, melihat bagaimana PDI Perjuangan Kota Semarang dari empat dimensi pelembagaan partai. Empat dimensi pelembagaan yaitu, dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi otonomi, dan dimensi citra publik/reifikasi.
- BAB V** Kesimpulan
- Kesimpulan dari hasil data penelitian secara keseluruhan akan dibahas pada bab ini. Bab ini juga akan berisikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II PARTAI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PARTAI

Teori didefinisikan sebagai seperangkat ungkapan yang dapat dipercaya yang kemudian saling membaaur untuk menghasilkan kesatuan utuh dengan mengikuti suatu aturan agar dapat dihubungkan dengan logis maupun berdasarkan data dasar yang dapat dipelajari secara mendalam yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk memprediksi dan menjabarkan fenomena yang diteliti (Moleong, 2002 : 34). Agar lebih mendalami penelitian ini, maka penulis akan mengkaji lebih dalam teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

### A. Partai Politik

#### 1. Asal mula partai politik

Asal usul partai politik dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama adalah teori dimana terdapat suatu gagasan bahwa karena anggota parlemen (yang dipilih berdasarkan penunjukan) harus mengadakan kontrak dengan masyarakat umum, partai politik dibentuk oleh badan legislatif (dan eksekutif). Masyarakat yang sadar bahwa kepentingan mereka tidak dapat tertampung dalam fungsi partai yang dibentuk oleh pemerintah akan membangun partai sendiri yang bertujuan untuk menjadi alat menggerakkan massa agar berjuang bersama demi kemerdekaan mereka sendiri.

Teori gagasan kedua, sistem politik dapat melalui krisis situasi historis mungkin dikarenakan mengalami transisi sebagai akibat dari perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang lebih rumit. Transisi ini mengakibatkan timbulnya tiga macam krisis yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi telah menyebabkan masyarakat meragukan sila-sila fundamental yang menjustifikasi hak pemerintah untuk memerintah, serta terciptanya isu-isu identitas yang mendefinisikan masyarakat sebagai negara kesatuan dan membangkitkan desakan besar untuk mengikuti proses politik. Kemudian partai politik hadir menjadi solusi untuk mengatasi tiga krisis diatas, diharapkan partai politik berangkat dari

masyarakat sehingga dapat menjadi sarana pengintegrasikan umum dan menjadi media untuk masyarakat menyalurkan partisipasi politiknya.

Teori yang terakhir dilihat dari kemajuan pergerakan sosial ekonomi, seperti kemajuan pada teknologi komunikasi yaitu media massa dan transportasi; meluas dan meningkatnya bidang pendidikan serta bidang industrialisasi; perpindahan penduduk; meluasnya kekuasaan negara, seperti pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat yang tidak dipilih oleh masyarakat umum; terbentuknya kelompok-kelompok berkepentingan, organisasi dengan bidang pekerjaan yang sama dan meningkatnya individu yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan munculnya kebutuhan untuk menciptakan suatu organisasi yang dapat menyatukan serta memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut (Surbakti, 2013 : 144-146).

## 2. Pengertian Partai Politik

Partai politik umumnya disebut sebagai suatu kelompok yang tersusun dalam suatu kesatuan dengan anggota yang memiliki pandangan, nilai, dan keinginan yang sejalan. Kemudian kelompok ini bertujuan mendapatkan kekuasaan politik yang umumnya juga mengambil kedudukan politik menggunakan prosedur yang sesuai dengan persyaratan hukum negara.

Carl J. Friedrich (Budiardjo, 2013 : 404) mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

Partai politik adalah kelompok manusia yang tersusun dalam suatu kesatuan secara stabil yang bertujuan mengambil alih atau mempertahankan kekuasaan pimpinan partainya pada suatu pemerintahan dan dengan kekuasaannya tersebut, dapat menghasilkan manfaat bagi anggota partainya baik bersifat ideil serta materiil.

Giovanni Sartori (Budiardjo, 2013 : 405) mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

suatu kelompok politik yang turut serta dalam pemilihan umum dan pemilihan tersebut menghasilkan didatukannya calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Lapalombara dan Weiner menjelaskan organisasi dengan kegiatan yang berkelanjutan adalah partai politik. Yang berarti, Umur sebuah partai tidak bergantung pada masa jabatan pemimpinnya dalam pemerintahan maupun kehidupan pribadinya. Organisasi ini bersifat terbuka dan tetap tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi hingga pada tingkat lokal. Pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki keinginan yang kuat untuk menjabat dan mempertahankannya dalam rangka pengambilan keputusan politik. Mereka juga memiliki kekuatan pribadi untuk berkoalisi atau bekerja sama dengan pihak lain dan terlibat dalam kegiatan untuk meraih dukungan masyarakat luas (Surbakti, 2013 : 146).

Berdasarkan pengertian-pengertian oleh para ahli diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi resmi yang dibuat oleh kumpulan individu dengan kepentingan bersama dan memiliki tujuan untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan sesuai dengan aturan yang ada.

### 3. Fungsi partai politik

Partai politik memiliki fungsi utama (Surbakti, 2013 : 149) yakni merebut serta mempertahankan kekuasaan yang bertujuan menjalankan program yang telah direncanakan berdasarkan ideologi partai. Ketika partai politik ditempatkan dalam sistem demokrasi, partai politik melakukan tiga kegiatan untuk mendapatkan kekuasaan memerintah yaitu: seleksi calon; kampanye; dan melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Ketika kekuasaan memerintah telah didapatkan, maka partai politik akan mendapatkan fungsi membuat keputusan politik. Selain fungsi yang telah disebutkan, terdapat fungsi lain dari partai politik, yaitu sebagai berikut:

- a) Sosialisasi politik, proses pembentukan sikap dan keyakinan politik anggota, anggota masyarakat, yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan berpolitik.
- b) Rekrutmen politik, adalah proses menyeleksi dan mengangkat sekelompok atau seseorang pada suatu partai. Nantinya anggota yang terpilih ini akan menjalankan beberapa peran dalam sistem politik (umumnya) dan pemerintahan (khususnya).

- c) Partisipasi politik, fungsi ini lebih banyak diterapkan pada sistem politik demokrasi. Karena adanya kesempatan dan ajakan yang diberikan kepada masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai wadah kegiatan yang berdampak pada proses politik. Anggota masyarakat atau warga negara biasa dapat ikut dalam proses membuat, melaksanakan kebijakan umum, dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Fungsi ini dapat berlangsung dari hal kecil seperti ketika masyarakat memberikan suaranya pada pemilihan umum.
- d) Pemadu kepentingan, Ketika berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan dapat terjadi di masyarakat. Tujuan partai politik adalah untuk mempertimbangkan, menganalisis, dan meleburkan berbagai kepentingan yang akan menjadikan alternatif kebijakan umum untuk diperjuangkan dalam perencanaan serta diwujudkan menjadi suatu keputusan politik.
- e) Komunikasi politik, ialah proses dimana terjadinya timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Disini partai politik menjadi media untuk menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi wadah menampung berbagai keluhan maupun aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
- f) Pengendalian konflik. Ketika masyarakat bebas berpendapat untuk kepentingannya masing-masing, bukan tidak mungkin konflik dapat terjadi ditengahnya. Maka partai politik dapat menjadi media penengah untuk mengendalikan konflik melalui diskusi dengan pihak berkonflik yang nantinya akan menghasilkan keputusan politik sebagai bentuk penyelesaian dari konflik tersebut.
- g) Kontrol politik, adalah suatu kegiatan untuk mengawasi kebijakan yang diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, apakah ada kesalahan maupun penyimpangan. Diharapkan kontrol politik dapat menjadi tolak ukur suatu partai untuk memperbaiki dan memperbaharui partai tersebut secara terus menerus.

## B. Pelembagaan Partai

### 1. Pengertian Pelembagaan Partai

Menurut Randall dan Svasand (Randall dan Svasand, 2002 : 13) Ketika sebuah partai mengembangkan pola perilaku yang telah dimodifikasi dalam hal sikap dan budaya, proses tersebut dikenal sebagai pelembagaan. Pelembagaan partai dilihat oleh Randall dan Svasand dari dua perspektif, yaitu internal-eksternal dan kultural-struktural, apabila aspek-aspek ini disilangkan menghasilkan kesimpulan terciptanya empat dimensi yang dapat menjadi alat untuk menganalisis pelembagaan partai politik dan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat pelembagaan partai.

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Kultural	Identitas Nilai	Citra Publik

Tabel 2. 1 Dimensi Pelembagaan Partai Politik

Sesuai dengan tabel diatas, hasil dari aspek yang disilangkan menyilangkan beberapa aspek yang melahirkan empat dimensi pelembagaan. Yang pertama dimensi derajat kesisteman (*systemness*) merupakan hasil persilangan dari aspek internal dan struktural, selanjutnya hasil persilangan dari aspek internal dan kultural menghasilkan dimensi identitas nilai, hasil persilangan aspek eksternal dan struktural menghasilkan dimensi otonomi, dan yang terakhir persilangan dari eksternal dan kultural menghasilkan dimensi citra publik.

### 2. Dimensi Pelembagaan Partai

a) Derajat kesisteman (*systemness*) (Randall dan Svasand, 2002 : 17) melihat dari bagaimana internal partai mengelola struktur kekuasaannya. Dimensi kesisteman adalah proses menjalankan fungsi partai politik sesuai dengan aturan, kondisi, proses, dan mekanisme yang disepakati dan dituangkan dalam AD-ART, yang dirumuskan secara menyeluruh dan terperinci untuk dapat dijadikan pedoman perilaku mengarahkan prosedur dalam

menjalankan semua fungsi partai politik. Dalam dimensi ini yang paling berpengaruh adalah (1) bagaimana partai terbentuk dan berkembang (*how the party formed and developed*), (2) regulasi akses sumber keuangan (*relevant resources and especially funding*), (3) hubungan partai dengan pemimpinnya (*relationship between the party and their leader*), (4) hubungan antara kepemimpinan nasional dan lokal (*regional branches' relationship to the central leadership*), dan (5) implikasi dari klientelisme (*the implications of clientelism*). Dari perspektif kesisteman, sebuah partai dikatakan telah melembagakan dirinya jika telah melakukan tugas-tugas yang digariskan sebagaimana yang tercantum dalam AD-ART yang sudah dirumuskan dan disepakati.

- b) Identitas nilai (*values infusion*) (Randall dan Svasand, 2002 : 21) berdasarkan ideologi partai, partai dilihat kaitannya dengan sikap kebijakan dan kegiatan partai politik. Berdasarkan ideologi inilah yang kemudian menghasilkan basis sosial pendukung partai yang mendukung karena merasa sesuai dengan pola dan arah yang diusung partai. Karena itulah identitas nilai suatu partai berkaitan dengan lapisan sosial atau masyarakat yang mendukung partai tersebut. Maka hal yang perlu diperhatikan (Lutfi, 2012 : 8) untuk melihat suatu partai melembaga pada dimensi ini adalah, pertama apakah suatu partai memiliki hubungan dengan suatu gerakan sosial atau kelompok populer (*populis bases*) tertentu seperti komunitas agama dan komunitas etnis. Kemudian apakah didalam partai tersebut terjadi pengaruh klientelisme antara anggota dengan partainya, apakah lebih bersifat instrumentalis yang dimana anggotanya selalu mengharapkan *tangible resources* (imbalan dari partai) atau lebih bersifat ideologis yang dimana terdapat keselarasan antara partai dan anggotanya yang mengharapkan kesesuaian diantara ideologi dengan jalannya suatu partai. Suatu partai dianggap telah terlembagakan secara identitas nilai jika telah memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi pendukung setia (basis sosial) sebagai akibat dari pola dan arah

kebijakan yang ditempuh partai tersebut maupun akibat pengaruh politik, kecenderungan pendukungnya konsisten dengan ideologi partai.

- c) Derajat otonomi yang dimaksud adalah otonomi dalam pembuatan keputusan (*desicional autonomy*). Derajat otonomi (Randall dan Svasand, 2002 : 22) menentukan apakah pengambilan keputusan suatu partai dipengaruhi oleh aktor di luar partai, termasuk mereka yang memiliki sumber otoritas tertentu seperti penguasa atau pemerintah atau sumber pendanaan seperti pengusaha, pihak ketiga, atau sumber dukungan luas. Ketika suatu partai menggantungkan keputusannya pada suatu pihak, partai tersebut akan melemah karena tingkat loyalitas pendukungnya nanti hanya bergantung pada pihak tersebut. Maka suatu partai akan disebut telah melembaga dari segi ini apabila semua keputusan yang diambil merupakan keputusan anggota partai itu sendiri dan telah bebas dari campur tangan pihak luar partai.
- d) Citra publik atau Reifikasi (*reification*) ini adalah mengenai sejauh mana keberadaan suatu partai dalam imajinasi pada masyarakat. Apabila suatu partai sudah melekat pada pengetahuan masyarakat, maka masyarakat akan menyesuaikan aspirasi maupun harapannya dengan partai yang akan dipilih. Yang terpenting pada reifikasi suatu partai adalah umur panjang, kemampuan partai bertahan dari waktu ke waktu (Randall dan Svasand, 2002 : 23). Dari perspektif citra publik ini, sebuah partai sudah melembaga jika publik dapat mengidentifikasi sosok dan kiprah partai politik berdasarkan identitas nilai-nilai partai, sehingga publik memahami tindakan yang akan diambil oleh partai tersebut.

### BAB III GAMBARAN UMUM PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian ini yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang. Sebelumnya penulis akan memaparkan tentang profil Kota Semarang yang akan dilanjutkan dengan pembahasan gambaran umum Pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang.

#### A. Gambaran umum Kota Semarang

##### 1. Kondisi Geografis

Semarang terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 373,70 km atau 37.366.836 Ha. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Elevasi Kota Semarang berkisar antara 0,75 hingga 348,00 meter di atas permukaan laut.

Uraian <i>Description</i>	Batas Wilayah <i>Borderline</i>	
	Letak Lintang <i>Latitude</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
1. Sebelah Utara <i>North</i>	6° 50'	Laut Jawa
2. Sebelah Selatan <i>South</i>	7° 10'	Kab. Semarang
3. Sebelah Barat <i>West</i>	109° 35'	Kab. Kendal
4. Sebelah Timur <i>East</i>	110° 50'	Kab. Demak

*Tabel 3. 1 Letak Geografis Kota Semarang*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup>, dengan 39,56 km<sup>2</sup> (10,59%) lahan sawah dan 334,14 km<sup>2</sup> (89,41%) lahan non sawah. Sawah tadah hujan meliputi sebagian besar luas sawah (53,12%), dan hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami 2 (dua kali). Lahan kering yang jumlahnya

mencapai 42,17% dari total lahan non sawah sebagian besar digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan pekarangan sekitarnya.

## 2. Kondisi Topografis

Topografi Kota Semarang meliputi perbukitan, dataran rendah, dan pantai. Kota Semarang memiliki topografi yang landai. 65,22% wilayah Kota Semarang merupakan pantai dengan kemiringan 25%, dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Lereng Kota Semarang diklasifikasikan menjadi empat tipe, dengan Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Tugu, serta sebagian Kecamatan Tembalang, Banyumanik, dan Mijen. Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati, dan Ngaliyan merupakan bagian dari Lereng II (2-5%). Lereng III (15-40%) meliputi wilayah sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian Kecamatan Mijen (wilayah Wonoplumbon), Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (tenggara) dan Kabupaten Gunungpati, khususnya di sekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

No	Bagian Wilayah	Ketinggian (dpl)
1	Daerah pantai	0,75
2	Pusat Keramaian Kota	2,45
3	Simpang Lima	3,49
4	Candi Baru	90,56
5	Jatingaleh	136,0
6	Gombel	270,00
7	Gunungpati Barat	259,00
	Gunungpati Timur Laut	348,00
8	Mijen	253,00

*Tabel 3. 2 Ketinggian Daerah di Kota Semarang*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020

Menurut data Disperakim Jateng tinggi wilayah di atas permukaan laut Kota Semarang adalah 348 meter. Memiliki ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (dpl) di daerah perbukitan yang diwakili oleh titik tinggi

di Jatingaleh, Gombel, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian 0,75 mdpl berupa pantai dan dataran rendah yang berpotensi banjir jika terjadi hujan berkepanjangan. Ketinggian semua lokasi di Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Dataran pesisir: 1% dari luas total pada ketinggian 0 - 0,75 meter di atas permukaan laut.
- b. Dataran rendah: 33% dari total wilayah dengan ketinggian berkisar antara 0,75 sampai 5 meter di atas permukaan laut.
- c. Dataran tinggi mencapai 66% dari total luas daratan, dengan ketinggian berkisar antara 5 hingga 348 meter di atas permukaan laut.

### 3. Kondisi Demografis

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Ngaliyan adalah kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan Mijen dan Gunungpati memiliki wilayah terluas, masing-masing seluas 57,55 km<sup>2</sup> dan 54,11 km<sup>2</sup>. Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas wilayah terkecil, masing-masing seluas 5,93 km<sup>2</sup> dan 6,14 km<sup>2</sup>.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Semarang

Sumber: Disperakim Jawa Tengah

Berdasarkan Dispendukcapil Kota Semarang, menurut perhitungan terakhir (Desember 2021) penduduk Kota Semarang terhitung sebanyak 1,687,222 jiwa.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	28,201	30,596	58,797
2	Semarang Barat	76,870	79,382	156,252
3	Semarang Utara	60,744	62,285	123,029
4	Semarang Timur	34,546	36,426	70,972
5	Gayamsari	36,188	36,784	72,972
6	Gajahmungkur	29,252	30,046	59,298
7	Genuk	61,055	60,536	121,591
8	Pedurungan	97,802	99,257	197,059
9	Candisari	38,793	39,892	78,685
10	Banyumanik	70,602	72,283	142,885
11	Gunungpati	48,718	48,973	97,691
12	Tembalang	93,041	93,649	186,690
13	Tugu	17,070	16,942	34,012
14	Ngaliyan	70,257	70,943	141,200
15	Mijen	39,179	39,289	78,468
16	Semarang Selatan	33,086	34,535	67,621
	Total	835,404	851,818	1,687,222

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Kota Semarang dengan jumlah penduduk 1.687.222 jiwa menduduki peringkat kelima di Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Persebaran penduduk di setiap kecamatan tidak merata, terbukti dari hasil sensus terakhir (2020) yang menyatakan bahwa Kecamatan Candisari merupakan wilayah terpadat dengan total kepadatan penduduk 11.538 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah yaitu 1.033 jiwa/km<sup>2</sup>. Menurut usia, 1,18 juta (71,48%) penduduk Kota Semarang merupakan usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia tidak produktif sebanyak 471,51 ribu orang (28,52%). Kemudian terdapat 367,02 ribu (22,2%) penduduk Kota Semarang pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun) dan 104,5 ribu (6,32%) pada kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas).

Setiap pendataan, daftar pemilih tetap Kota Semarang terus bertambah. Data tahun 2019 yang didapatkan dari KPU Kota Semarang DPT di Kota Semarang terhitung 1.134.279 jiwa. Dengan Kecamatan Pedurungan sebagai daerah dengan DPT terbanyak, yaitu 130.483 jiwa. Pada pendataan tahun 2020, jumlah DPT di Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi 1.174.068 jiwa.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Semarang Tengah	15	126	21.083	23.705	44.789
2	Semarang Utara	9	258	41.667	44.238	85.905
3	Semarang Timur	10	156	25.114	27.569	52.683
4	Gayam Sari	7	148	24.712	26.099	50.811
5	Genuk	13	226	39.933	40.384	80.317
6	Pedurungan	12	412	66.896	70.614	137.510
7	Semarang Selatan	10	143	22.948	25.486	48.434
8	Candisari	7	158	26.902	29.235	56.137
9	Gajah Mungkur	8	120	19.931	21.685	41.616
10	Tembalang	12	350	61.086	64.202	125.288
11	Banyumanik	11	301	47.099	51.784	98.883
12	Gunungpati	16	200	32.773	33.889	66.664
13	Semarang Barat	16	329	53.928	57.858	111.786
14	Mijen	14	154	25.647	26.636	52.282
15	Ngaliyan	10	297	47.945	49.494	97.339
16	Tugu	7	69	11.700	11.924	23.624
Total		177	3447	568.266	604.802	1.174.068

Tabel 3. 4 Daftar Pemilih Tetap Kota Semarang 2020

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang mayoritas agama yang dianut adalah Islam yaitu sebanyak 1.470.442 jiwa. Selain mayoritas warga menganut Agama Islam, warga Kota Semarang juga menganut berbagai agama yang terdiri dari: Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Lainnya
1.470.442	116.744	86.166	1.236	10.894	427

Tabel 3. 5 Jumlah Penganut Tiap Agama di Kota Semarang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021

Terdapat banyak ikon dalam kota yang menunjukkan ciri khas agama selain agama mayoritas yaitu Islam. Seperti Sam Poo Kong yang kental dengan *buddhisme*. Ada juga Gereja Blenduk, dan Pura Agung Giri Natha. Dengan berbagai ikon religi ini, terbukti bahwa warga Kota Semarang menganut berbagai agama yang terdiri dari: Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain agama Kota Semarang juga memiliki berbagai etnis didalamnya, yaitu Jawa, Tionghoa dan Arab. Dibuktikan dengan adanya daerah Pecinan dan kampung Arab. Ketiga etnis ini digambarkan menjadi salah satu ikon budaya yaitu “Warak Ngendok”. Menurut Triyanto (Triyanto, 2013 : 162) Etnis Jawa direpresentasikan dengan tubuh kambing, etnis Arab dengan gambar leher unta, dan etnis Tionghoa dengan gambar kepala naga.

## B. Profil PDI Perjuangan

### 1. Sejarah PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973 dari penggabungan atau fusi lima partai politik. Kelima partai politik tersebut adalah sebagai berikut: 1) PNI, Partai Nasional Indonesia, yang merepresentasikan nilai dan jiwa nasionalisme; 2) Parkindo, Partai Kristen Indonesia; 3) PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia; 4) IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan terutama oleh militer; dan 5) Murba, penggabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.

Fusi dari kelima partai mengalami proses yang sangat panjang, serta banyak konflik internal yang dihadapi. Konflik yang dihadapi yang pertama adalah, kelima partai politik tersebut berbeda latar belakang, basis sosial, dan orientasi ideologisnya. Kedua, ada perbedaan dalam motivasi dan strategi fusi. Ketiga, partai-partai politik sangat kompetitif dan tidak percaya satu sama lain. Keempat, antagonisme antar elit lintas partai politik dan di dalam partai politik. Kelima, struktur telah dikurangi dari lima partai politik menjadi satu, mengakibatkan persaingan yang semakin ketat untuk memperebutkan

slot yang lebih terbatas. Keenam, lima poin di atas diperparah oleh keinginan rezim untuk menjinakkan bahkan mengerdilkan partai politik. Kemudian kelima parpol memutuskan untuk menjalankan rapat internal masing-masing. Barulah PDI mengadakan musyawarah nasional pertama yang disebut "Konpernas" (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta tanggal 20-24 September 1973.

Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) 2-6 Desember 1993. Kemudian pada Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan menjadi ketua umum DPP PDI secara de jure.

Pada 27 Juli 1996, terjadi peristiwa yang dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli". dimana pada hari itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Pada Pemilu 1997 PDI berada dibawah kepemimpinan Soerjadi yang membawa PDI kepada hasil yang merosot dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR. Hingga di tahun 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menaikkan nama PDI lagi hingga mengadakan Kongres V PDI yang menghasilkan diangkatnya kembali Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI. Meski Megawati kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI, namun yang diakui Pemerintah adalah PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea.

Maka disinilah nama PDI Perjuangan lahir. Nama PDI Perjuangan lahir dikarenakan, pergantian nama partai guna mendaftarkan PDI pada Pemilu 1999 dibawah kepemimpinan Megawati. Pergantian nama ini terjadi pada 1 Februari 1999 yang kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999. Pada pemilu ini PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pemilu, dan menempatkan 151 wakilnya pada DPR. Nama PDI Perjuangan menjadi semakin maju semenjak dilantiknya Megawati menjadi wakil presiden ke-4 mendampingi KH Abdurahman Wahid. Yang kemudian mengarahkan Megawati pada kesuksesan yaitu kembali dilantik namun kali ini menjadi Preside Republik

Indonesia yang ke-5. Kejayaan PDI Perjuangan masih melekat sampai sekarang, meski mengalami beberapa kali kekalahan dalam Pemilu. Namun, pada dua periode terakhir PDI Perjuangan mampu merebut kembali kemenangan pada Pemilu.

## 2. Makna Lambang

Jika membicarakan mengenai lambang dari PDI Perjuangan, siapa yang tidak mengenali lambang banteng dengan warna merah menyala ini.



*Gambar 3. 2 Lambang PDI Perjuangan*

Lambang PDI Perjuangan terdiri dari gambar banteng berwarna hitam dengan moncong putih bermata merah, yang berada di dalam lingkaran dengan warna dasar merah. Lambang ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Banteng bertanduk kekar melambangkan kekuatan rakyat dan senantiasa membela kepentingan mereka.
2. Merah, warna utama atau dasar, berarti keberanian mengambil risiko dalam mengejar hak publik atas kebenaran dan keadilan.
3. Mata merah dengan pandangan tajam menunjukkan perhatian terus-menerus terhadap ancaman dalam perjuangan.
4. Moncong putih melambangkan kepercayaan dan dedikasi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
5. Lingkaran merah melambangkan ketetapan hati yang tak tergoyahkan dan perjuangan tanpa henti.

### 3. Ideologi PDI Perjuangan

Ideologi yang dipakai oleh PDI Perjuangan adalah Ideologi Pancasila. Ideologi sudah diterapkan sejak awal pembentukan partai yang kemudian disahkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005 dan tercatat pada AD-ART PDI perjuangan sampai saat ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpusat pada Pancasila dan didirikan pada tanggal 1 Juni 1945. Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan jatidiri partai. Serta partai yang bercirikan gotong royong, demokratis, kemandirian, keuletan, dan revolusioner yang progresif.

### 4. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Visi partai PDI Perjuangan menjadi sebab terbentuknya partai atau masa depan yang diinginkan, yang kemudian menjadi arah perjuangan partai. Sedangkan misi partai adalah isi kehidupan yang dijalankan partai dan menjadi dasar kelangsungan eksistensi partai.

#### a. Visi PDI Perjuangan

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan, visinya adalah:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan

melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Misi PDI Perjuangan

Berdasarkan amanat pasal, 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan, misinya antara lain:

Pasal 7 mengandung tujuan umum, sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 mengandung tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 mengandung fungsi, sebagai berikut:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik.
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 mengandung tugas, sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

#### C. Dewan Perwakilan Cabang Kota Semarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Setiap partai memiliki banyak kepengurusan dan cabangnya masing-masing agar dapat menjalankan fungsi dan tujuan partai hingga ke tingkat yang terkecil. Tidak terkecuali partai PDI Perjuangan, dengan kekuatannya yang saat ini menjadi partai dengan pendukung paling banyak di Indonesia tentu saja PDI Perjuangan juga memiliki kepengurusan di tingkat daerah. Salah satunya dewan perwakilan cabang Kota Semarang. Dewan perwakilan

cabang (DPC) Kota Semarang sendiri adalah suatu organisasi yang berada dibawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan kekuasaan pimpinan di tingkat daerah khususnya Kota Semarang. Tujuan dibentuknya DPC adalah untuk menjalankan fungsi partai serta mencapai tujuan partai sebagaimana yang ada didalam AD-ART partai PDI Perjuangan untuk wilayah Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menaungi 16 PAC (Pengurus Anak Cabang) karena Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan, 177 Ranting, dan ±5400 Anak Ranting.

Tiap tingkatnya PDI Perjuangan memiliki struktur kepengurusan dengan jumlah pengurus yang berbeda-beda. Detail perbedaan dari tiap tingkatnya adalah sebagai berikut:

Total pengurus	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Wakil Bendahara
19	1	13	1	2	1	1

*Tabel 3. 6 Kepengurusan tingkat Dewan Perwakilan Cabang*

Total pengurus	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Wakil Bendahara
11	1	6	1	1	1	1

*Tabel 3. 7 Kepengurusan tingkat Perwakilan Anak Cabang*

Total pengurus	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Bendahara	Wakil Bendahara
9	1	4	1	1	1	1

*Tabel 3. 8 Kepengurusan tingkat Ranting*

Total pengurus	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara
5	1	2	1	1

*Tabel 3. 9 Kepengurusan tingkat Anak Ranting*

Organisasi yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan yang kemudian menjadi organisasi-organisasi sayap dari PDI Perjuangan antara lain: Banteng Muda Indonesia (BMI); Taruna Merah Putih (TMP); Gerakan Nelayan dan Tani (GANTI); Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi); dan Relawan

Perjuangan Demokrasi (Repdem). Selain organisasi sayap, terdapat badan-badan yang sering berkepentingan untuk PDI Perjuangan antara lain: Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu); Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN); Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA); Badan Kebudayaan Nasional (BKN); Satuan Tugas (SATGAS); Komunitas Juang; Derap Juang; Cyber Juang; Pandu Juang dan masih banyak lagi. Organisasi serta badan-badan diatas adalah bagian yang membantu jalannya Partai PDI Perjuangan, dimana senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang berguna dan sesuai dengan tujuan serta fungsi partai.

Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan membantu program kerja dari PDI Perjuangan itu sendiri. Program kerja utama yang dilakukan diantaranya seperti rekrutmen anggota, perencanaan pemenangan pemilu, pendekatan kepada tokoh-tokoh, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum. DPC Kota Semarang memiliki program kerja yang dilakukan secara rutin yaitu DPC bersama fraksi akan mengunjungi 16 kecamatan untuk melakukan penyerapan aspirasi rakyat serta anggota dan pemaparan dari apa yang sudah dilakukan oleh DPC. Kegiatan ini dinamakan “Roadshow”.

#### 1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang Periode Tahun 2019-2024

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai PDI Perjuangan, Struktur dan komposisi dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang masa bakti 2019-2024:

1. **Ketua:** Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

#### **Bidang Internal**

2. **Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai:**

Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos

3. **Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu:**

Paulus Sudaryanto, S.E

4. **Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi:**

I Gede Ananta Wijaya Putra, S.T., M.M

**5. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi:**

Dyah Ratna Harimurti, S.Sos

**Bidang Pemerintahan**

**6. Wakil Ketua Bidang Politik:** Fajar Aji Pamungkas, S.H

**7. Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan:** Fajar Rinawan Sirotus, S.H

**8. Wakil Ketua Bidang Perekonomian:** Michael, S.Kom

**9. Wakil Ketua Bidang Kebudayaan:**

Martinus Dwi Septianto, S.E

**Bidang Kerakyatan**

**10. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak:** Lely Purwandari

**11. Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi, dan UKM:** Endang Retnawati, S.E

**12. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:**

Chatherine Anggraeny, S.E., Ak., CA., ACPA

**13. Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa:** H. Supriyadi, S.Sos

**14. Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan:**

R. Yuwanto

**15. Sekretaris:** Kadarlusman

**16. Wakil Sekretaris Bidang Internal:** Wisda Pridatoe

**17. Wakil Sekretaris Bidang Program:** Margono

**18. Bendahara:** M. Rukiyanto A.B., S.H., M.A.

**19. Wakil Bendahara:** Kristiani, S.Sos

## BAB IV

### ANALISIS DERAJAT KESISTEMAN DAN IDENTITAS NILAI PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG

#### A. Derajat Kesisteman

##### 1. Demokrasi Internal

Partai PDI Perjuangan adalah partai yang dikenal sebagai partai yang mengedepankan gotong royong dan kebersamaan. Agar seluruh anggota partai dapat menyampaikan pendapatnya serta ikut andil dalam jalannya partai, maka gotong royong adalah hal wajib dalam PDI Perjuangan. Proses demokrasi yang terjadi didalam partai, menerapkan cara yang didasarkan pada kebersamaan seperti rapat, musyawarah, hingga konferensi dengan menggunakan AD-ART sebagai pedomannya. Menurut Anggaran Rumah Tangga, pengambilan keputusan pada tiap rapat Partai harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, apabila dihadapkan dengan masalah-masalah yang urgensinya tidak begitu berat dan bisa diselesaikan di dalam lingkup pengurus biasanya akan melaksanakan rapat pleno pengurus DPC saja. Namun, pada masalah-masalah tertentu DPC tetap memerlukan pendapat dan persetujuan dari DPP. Hal ini juga berlaku ketika DPC membuat atau mengajukan suatu wacana yang berkaitan dengan partai di wilayah Kota Semarang, memerlukan persetujuan dari DPP;

“di DPC untuk hal-hal yang bersifat tidak prinsip, contohnya rapat harian untuk kepentingan organisasi di tingkat kota agar dapat berjalan dengan baik itu bisa diputuskan di dalam DPC. Tapi kalau itu bersifat prinsip, suatu contoh pencalonan anggota legislatif. Itu memang penjaringan dan penyaringannya dilakukan oleh DPC, tetapi untuk bisa mendapatkan rekomendasi siapa saja calonnya, harus dikirim ke DPD yang kemudian dikirim ke DPP, nantinya akan turun surat rekomendasi bahwa a, b, c, d, e disetujui untuk menjadi bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan. Demikian juga untuk bakal calon walikota dan wakil walikota. Kita DPC hanya melakukan penjaringan dan penyaringan. Jadi ada mekanisme yang bisa diselesaikan ditingkat cabang, ada yang di tingkat daerah, dan ada juga yang harus memerlukan DPP.” (Untung Sudjarno S.H. 20 Juli 2022).

Demokrasi internal DPC Kota Semarang masih memerlukan rekomendasi, serta persetujuan dari DPD maupun DPP untuk hal-hal tertentu.

Seperti yang dijelaskan diatas, contohnya pencalonan legislatif. DPC hanya bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan dari para bakal calon. Penjaringan yang dimaksud adalah membuka pendaftaran dan penyaringan adalah menyaring hasil pendaftaran tadi yang kemudian diverifikasi dan disaring siapa saja bakal calon yang layak serta memenuhi syarat untuk dikirim ke DPP. Contoh lainnya adalah untuk pembentukan pengurus PAC, surat keputusannya harus dikeluarkan oleh DPD. Yang artinya masih memerlukan persetujuan bagian yang lebih atas dari DPC.

Mekanisme musyawarah tetap menjadi mekanisme utama DPC untuk mengambil keputusan, namun campur tangan dari level yang lebih tinggi yaitu DPD maupun DPP masih diperlukan untuk keperluan-keperluan tertentu. Karena sesuai dengan AD-ART PDI Perjuangan, Sistem perwakilan digunakan untuk mencapai mufakat jika mekanisme pengambilan keputusan tidak berhasil mencapai mufakat. Selain itu, AD-ART menetapkan bahwa dalam hal mufakat tidak dapat dicapai dengan cara demikian, pimpinan partai di atasnya harus mengambil keputusan akhir.

## 2. Keutuhan Organisasi

Gotong royong dan kebersamaan menjadi hal yang dibanggakan oleh Partai PDI Perjuangan. Untuk membuktikan hal tersebut, PDI Perjuangan mewujudkannya dengan demokrasi internal yang baik yaitu selalu mengedepankan musyawarah. Selain itu, di dalam organisasinya pun DPC Kota Semarang juga tidak pernah mengalami munculnya faksi di dalam kepengurusannya. Hal ini dikarenakan, semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Ketua sekretariat DPC Kota Semarang Untung Sudjarno mengklaim bahwa di dalam kepengurusan DPC Kota Semarang itu semuanya solid;

“Sampai hari ini kita bersyukur di DPC PDI Perjuangan tidak ada faksi. Kenapa tidak ada? Karena setiap masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Pada waktu konfercab, kita melakukan secara musyawarah mufakat, sehingga selesai konfercab, tidak muncul masalah, karena tidak muncul masalah maka tidak muncul faksi. Biasanya munculnya faksi itu dikarenakan, mulai dari konferensi cabang ketika kalah voting, sangat mudah memunculkan faksi-faksi. Kami ini bentuknya mengerucut keatas, dari

mulai anak ranting, ranting, PAC, DPC, DPD, sampai DPP itu mengerecut keatas untuk sepakat pada satu keputusan. Maka kami mengatakan sekarang ini kami adalah solid bergerak. Solid, kita tidak ada faksi apa pun, kita berada di satu barisan, untuk bergerak demi kepentingan bangsa dan negara.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Salah satu hal yang menjaga keutuhan organisasi PDI Perjuangan adalah peraturan AD-ART dimana seluruh anggota partai diwajibkan memegang teguh asas dan jati diri partai. Dengan kewajiban ini anggota bebas untuk mengungkapkan keinginan dan gagasan mereka kepada Partai secara tertulis atau lisan, memberikan persetujuan mereka untuk berbicara di rapat, dan memperoleh kemampuan untuk memilih dan dipilih dengan komitmen ini.

Keutuhan organisasi DPC Kota Semarang jauh dari kata perpecahan. Sebagaimana dijelaskan, DPC Kota Semarang selalu mengedepankan kebersamaan melalui musyawarah mufakat. Solid bergerak yang diterapkan oleh PDI Perjuangan, benar-benar berfungsi hingga di tingkat DPC. Maka organisasi di tingkat ini menjadi organisasi yang keutuhannya baik.

### 3. Sistem Keanggotaan dan Kaderisasi

Partai PDI Perjuangan adalah partai dengan jumlah pendukung yang tidak bisa dikatakan sedikit lagi. Dengan banyaknya pendukung inilah, tentu partai PDI Perjuangan menarik perhatian masyarakat yang memiliki visi, misi, dan ideologi yang sejalan dengan mereka. Maka, partai PDI Perjuangan membuka pendaftaran bagi berbagai kalangan. Syarat untuk menjadi anggota biasa dari partai PDI Perjuangan adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah.
2. Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya.
3. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai.
4. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai.

5. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai.

Ada berbagai tingkatan anggota partai PDI Perjuangan, antara lain anggota biasa, anggota partai, anggota, kader, dan anggota kehormatan. Berikut adalah perbedaan antara berbagai tingkatan anggota ini:

1. Warga negara Indonesia yang mendaftar secara sukarela, memenuhi persyaratan keanggotaan partai, dan disetujui sebagai anggota biasa partai oleh pimpinan partai disebut sebagai anggota biasa partai.
2. Anggota partai adalah anggota tetap partai yang telah mengikuti program partai untuk pembinaan, pembinaan, dan pelatihan.
3. Kader partai adalah anggota partai yang telah menyelesaikan program pelatihan kader partai atau yang telah menunjukkan komitmen, kesetiaan, dan pengabdian kepada partai dan masyarakat. Jenjang pendidikan partai adalah: Kader Pratama; Kader Madya; Kader Utama. Namun diluar poin-poin ini, warga negara dengan bakat profesional tertentu dapat diangkat menjadi anggota kader partai dan ditempatkan di lembaga politik, serta lembaga publik atau lembaga lainnya, setelah mengikuti sekolah partai atau pendidikan kader khusus.
4. Anggota kehormatan partai adalah orang Indonesia yang telah memberikan jasa-jasa luar biasa kepada partai dan pendapatnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai, identitas, karakter, dan tujuan partai diberi keanggotaan kehormatan dalam partai.

Setiap hari rekrutmen anggota dibuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan. Metode yang berbeda dapat digunakan untuk mendaftar. Seperti yang ditunjukkan oleh ketua sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang;

“DPC PDI Perjuangan itu setiap hari membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan, pendaftarannya bisa dilakukan secara online dan offline. Kalo offline, datang ke DPC, yang akan langsung ditangani dengan pengurus yang bertugas di DPC. Kemudian, selain disini

bisa mendaftar lewat ranting, bisa daftar lewat PAC. Setelah mereka mendaftar di tingkat ranting maupun PAC, berkas-berkas itu akan dibawa kesini, disini diproses oleh pengurus DPC, karena setiap anggota PDI, selain terdaftar disini juga terdaftar di DPP. Itu menggunakan sistem yang dinamakan sistem new jarek, dari sini oleh pengurus, diproses dengan mengirim daftar nama calon anggota, yang kemudian turun lagi kesini untuk dibuatkan KTA. Cuma ketika sistem pusat di Jakarta rusak, ya disini tidak bisa bekerja, karena jika sistem disana error ya disini juga error, karena itu kan terpusat.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Proses rekrutmen anggota dapat dilakukan dengan cara online maupun offline. Pendaftaran offline dilakukan dengan mendatangi kantor DPC. Yang akan langsung diproses oleh petugas. Selain itu sebagaimana dijelaskan ada berbagai cara untuk melakukan pendaftaran, yaitu dengan mendatangi PAC atau Ranting. Apabila pendaftaran dilakukan dengan mendatangi PAC atau Ranting, perlu dan wajib dikirimkan ke DPC yang kemudian nantinya akan diproses oleh pengurus. Proses ini gunanya untuk mengirimkan data ke pusat (DPP). Karena setiap anggota PDI Perjuangan selain terdaftar di masing-masing DPC juga akan terdaftar di DPP. DPC akan membuat daftar nama para calon anggota yang akan bergabung ke PDI Perjuangan. Kemudian dikirim ke DPP, dari DPP turunkan persetujuan, yang nantinya DPC akan melanjutkan dengan membuat KTA (Karta Tanda Anggota) bagi para anggota yang sudah diterima.

Terdapat kelemahan dari sistem ini, dikarenakan sistem yang sekarang serba menggunakan teknologi online. Belum ada tindakan yang bisa mencegah, apabila sistem yang berada di pusat Jakarta atau yang berada di DPP error, efek samping dari error ini adalah mengakibatkan sistem yang ada pada DPC Kota Semarang tidak bisa bekerja, karena sistem ini bersifat terpusat.

Rekrutmen anggota partai PDI Perjuangan yang bersifat internal dilakukan dengan mekanisme rapat musyawarah. Ini dikarenakan PDI Perjuangan tidak mengenal istilah voting untuk menentukan siapa saja yang pantas menjadi pengurus di tiap tingkatnya, maka PDI Perjuangan menggunakan musyawarah hingga menemukan kesepakatan bersama. Untuk menentukan tingkatan pengurus yang lebih rendah, musyawarah akan

diselenggarakan oleh tingkatan yang lebih tinggi. Ketika musyawarah menghadapi kendala atau tidak ditemukannya hasil akhir, maka hasil rapat akan diserahkan kepada tingkatan yang lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Untung Sudjarno;

“Rekrutmen pengurus internal itu mekanismenya lewat rapat-rapat, suatu contoh rekrutmen untuk pengurus Anak Ranting itu melalui rapat Anak Ranting, pesertanya itu adalah para anggota, rapat Anak Ranting ini lima tahun sekali. Rapat Anak Ranting dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang. Kemudian di dalam menentukan pengurusnya, PDI Perjuangan tidak mengenal istilah voting, tapi menggunakan istilah musyawarah untuk mufakat. Caranya bagaimana? Ditingkat rapat Anak Ranting, apabila terjadi deadlock maka akan diserahkan kepada PAC untuk menentukan pengurus dengan melihat hasil rapat tadi. Bila terjadi mufakat diserahkan pada satu tingkat yang lebih tinggi untuk dibuatkan surat keputusan. Setelah sepakat, ditetapkanlah nama-nama ini, yang kemudian keluarlah surat keputusan.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Kepengurusan tingkat Ranting sedikit berbeda dengan penentuan pengurus di tingkat Anak Ranting. Di tingkat ini musyawarah pesertanya tiga pengurus anak ranting, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara yang dipimpin oleh DPC. Pada tingkat PAC musyawarah ini diberi istilah muscancab atau musyawarah anak cabang. Musyawarah ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dari Ranting dan dipimpin oleh DPD Jateng yang apabila tidak bisa hadir bisa dimandatkan kepada DPC. Musyawarah untuk menentukan pengurus DPC disebut konfercab atau konferensi cabang. Konfercab dipimpin oleh DPP, dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dari PAC. Ketika DPP berhalangan untuk hadir bisa digantikan oleh DPD. Tiap tingkatan yang memimpin jalannya musyawarah berarti berhak menentukan dan menetapkan pengurus apabila musyawarah tidak menemukan hasil akhir. Semua rapat penentuan anggota diatas, dilaksanakan tiap lima tahun sekali.

Kaderisasi dalam PDI Perjuangan dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Lewat pendidikan kader, sekolah partai, dan mengikuti komunitas juang. Tingkatan pendidikan kader adalah Pratama, Madya, dan Utama. apabila melalui sekolah partai, PDI Perjuangan menyediakan sekolah partai di Lenteng Agung Jakarta. Sekolah partai ini hanya didirikan di tingkat pusat dan dikelola oleh DPP dan ditujukan untuk:

- A. Anggota Partai;
- B. Kader Partai;
- C. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- D. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
- E. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya

Metode lainnya adalah melalui mendaftarkan diri ke komunitas juang. Untung Sudjarno menjelaskan;

“Warga biasa apabila ingin menjadi kader, tentu saja bisa, melalui komunitas juang. Nantinya warga tersebut akan dididik, dibina, diarahkan lewat komunitas ini. dijelaskan mengenai bagaimana itu partai PDI Perjuangan, bagaimana kondisi partai, dan mengajak bersama-sama bekerja untuk partai yang kita cintai dan juga dikenalkan wawasan-wawasan kebangsaan.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Melalui mendaftarkan diri ke Komunitas Juang nantinya calon anggota akan dididik, dibina, diarahkan hingga mendapatkan gambaran bagaimana PDI Perjuangan itu, memotivasi untuk bersama-sama bekerja untuk partai ini dan juga mengenalkan wawasan kebangsaan. Jadi sekolah partai maupun pendidikan-pendidikan kader ini tidak hanya sepenuhnya belajar mengenai PDI Perjuangan saja, tetapi juga berbicara mengenai kondisi bangsa, tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya.

Selain metode dan tahapan-tahapan di atas, cara untuk menjadi kader dalam PDI Perjuangan lainnya adalah dengan langsung menjadi pengurus. Pengurus internal partai dapat dikatakan sebagai kader dikarenakan dalam menjadi pengurus, para pengurus dihadapkan dengan berbagai kegiatan sulit sesuai bidangnya masing-masing;

“Ada juga bagi mereka yang langsung masuk menjadi pengurus, mereka bisa langsung disebut sebagai kader meski mereka belum mengikuti berbagai tahapan ini (pendidikan kader). Apabila ada orang yang sudah menjadi pengurus Ranting, maka dia dapat disebut sebagai kader meski belum mengikuti pendidikan kader, karena dia sudah melewati berbagai kegiatan yang tidak mudah.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Meskipun tidak mengikuti sekolah partai maupun pendidikan-pendidikan kader, para pengurus ini tetap bisa menjadi kader partai. Karena pada dasarnya PDI Perjuangan memiliki syarat kader partai yang ideal adalah individu yang telah menunjukkan stabilitas politik dan ideologis,

berkemampuan organisasi yang sangat baik, mengabdikan kepada partai, dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan/atau menjalankan operasi di dalam jajaran Partai dan/atau di masyarakat. Mereka juga harus jujur secara moral.

Setelah menjadi kader partai, penentuan tugas dan tingkatan di dalam partai ditentukan melalui musyawarah partai. Kader partai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pada tiap tingkatnya. Namun alangkah lebih baik apabila ingin menjadi kader pada tingkat DPP, baiknya sudah pernah menjabat pada tingkat yang lebih rendah;

“seyogya pengurus DPP paling tidak pernah menjadi pengurus DPC atau DPD. Tetapi partai harus melihat situasi dan kondisi. Jadi begini, kita juga melihat bahwa partai itu perlu orang-orang yang ahli dalam bidang apa? Kita perlu orang di bidang apa itu, dalam partai belum tentu ada. Seandainya ada tingkat kepakarannya kan belum tentu mumpuni. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, menyerahkan kader yang memang mumpuni untuk duduk di kepengurusan DPP walaupun kader ini belum pernah menjadi pengurus DPC atau DPD. Contohnya partai kita butuh tokoh dibidang kebudayaan yang mumpuni, maka Rano Karno dimasukan kedalamnya. Beliau dimasukan sebagai pengurus DPP di bidang tersebut.” (Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Kepengurusan pada DPP harus dilihat dari tingkat kebutuhan, tingkat kepakaran, tingkat kemampuan, hingga kinerja tiap pengurus harus diperhatikan dengan baik. Dasar pemilihan kepengurusan yang paling penting adalah *track record*, kepribadian, dan tidak mengikuti kelompok PDI yang tidak pro kepada Ketua Umum DPP, Megawati.

Kaderisasi pada tingkat DPC, melewati mekanisme musyawarah konfercab (konferensi cabang). Pada konfercab, akan ditentukan ketua terpilih dari DPP, untuk memimpin jalannya musyawarah. Didampingi oleh pimpinan siding dan formatur. Formatur inilah yang nantinya akan menentukan nama-nama calon pengurus DPC. Formatur terbentuk melalui kesepakatan bersama. Seperti kesepakatan, formatur yang berhak menentukan nama calon pengurus DPC adalah mereka yang di wilayah PAC mendapatkan perolehan suara legislatifnya tertinggi. Nama-namanya yang sudah ditentukan sebagai calon pengurus, akan dikirim ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi, nantinya nama-nama yang sudah

direkomendasikan oleh DPP akan disepakati bersama lagi di dalam konfercab dipimpin oleh ketua terpilih, didampingi pimpinan siding beserta para peserta. Semua yang duduk di kepengurusan DPC itu bisa diambil dari kader, bisa diambil dari pengurus Ranting, bisa diambil dari pengurus PAC.

## B. Identitas Nilai

Partai PDI Perjuangan dapat dikatakan melembaga dalam pada dimensi ini, apabila PDI Perjuangan khususnya di Kota Semarang memiliki golongan masyarakat yang menjadi pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan oleh partai tersebut, maupun karena orientasi politik pendukungnya sesuai dengan ideologi partai tersebut.

### 1. Basis Pendukung Partai

PDI Perjuangan adalah satu partai di Indonesia yang sudah berkiprah sejak lama. Seiring dengan perkembangan partai, organisasi di dalam partai juga semakin berkembang mengikuti kebutuhan partai. Ada pula organisasi-organisasi eksternal yang bergabung dan berafiliasi bersama PDI Perjuangan. Organisasi sayap, dibentuk oleh ketua atau wakil ketua pada tiap bidangnya. Pembentukan organisasi sayap ini adalah untuk membantu serta meringankan tugas dari ketua atau wakil ketua di tiap bidang tersebut. Organisasi sayap yang berafiliasi ke PDI Perjuangan diantaranya adalah; BMI (Banteng Muda Indonesia), TMP (Taruna Merah Putih), GANTI (Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia), Bahiyatul Muslimin, Relawan Perjuangan Demokrasi.

Selain organisasi eksternal yang bergabung ini, PDI Perjuangan juga memiliki badan-badan yang membantu jalannya tugas partai. Badan-badan yang berkecimpung membantu partai antara lain; Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu), BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional), BALEGLIT (Badan Legislasi dan Penelitian), BADIKLAT (Badan Pendidikan dan Pelatihan), BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat), BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana), BKN (Badan Kebudayaan Nasional), BPEK (Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan).

Badan-badan diatas memiliki tugas yang diatur dalam AD-ART yaitu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis dan berkala setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Keberadaan Badan Partai ini merupakan hal penting karena sesuai peraturan AD-ART bahwa selambat-lambatnya enam bulan setelah kongres Badan Partai sudah terbentuk. Ketua dari Badan Partai dipilih oleh Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya. Kemudian, Ketua Badan Partai memiliki wewenang menyusun, menetapkan dan mengubah komposisi, struktur dan personalia Badan Partai dengan harus melaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatnya.

Ada pula Satgas partai (Satuan Tugas) dan Komunitas Juang yang didirikan khusus untuk membantu keberlangsungan partai. Komunitas Juang dan Satuan Tugas Partai memiliki peraturan khusus yang diatur dalam AD-ART. Komunitas Juang bisa berupa unit kerja organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya yang bertindak sebagai *community organizer* untuk menghimpun pemilih dari luar basis Partai dengan cara menghimpun orang-orang menurut jenis komunitasnya. Satuan Tugas Partai adalah organisasi yang diberi nama Cakra Buana dan dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkat lokal. Tanggung jawab internal Satuan Tugas Partai adalah keamanan dan protokol, dan tanggung jawab eksternalnya adalah melakukan pengintaian.

Tugas organisasi sayap yang berafiliasi kepada partai adalah bergerak sesuai dengan bidang yang ditangani. Sehingga, menjelang pemilu, organisasi-organisasi sayap yang memiliki kaitan dengan pemilu akan bergerak di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah BMI, anggota BMI menjelaskan;

“Mendekati pemilu itu, kami bersama-sama bergerak untuk merekrut anggota, memperkenalkan diri bahwa kami adalah bagian dari PDI Perjuangan, mengawasi jalannya kampanye, mendukung kinerja partai dalam kemenangan pemilu dan mensosialisasikan partai kepada masyarakat” (Untung Sudjarno S.H. 23 Desember 2022).

Peran BMI disini adalah sebagai salah satu bagian yang menggerakkan anggota masyarakat untuk memperkenalkan serta mempromosikan partai PDI Perjuangan kepada masyarakat yang diharapkan dapat membawa PDI Perjuangan kemenangan pemilu.

Organisasi-organisasi ini tidak hanya bergerak pada waktu masa kampanye, atau masa-masa menjelang pemilu. Namun, mereka senantiasa bergerak, berkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. PDI Perjuangan selalu, berusaha membantu masyarakat dengan organisasi yang mereka miliki. Selain itu mereka juga memberikan pendidikan sesuai bidangnya kepada masyarakat maupun kepada kader PDI Perjuangan itu sendiri;

“Mereka tidak hanya aktif menjelang pemilu saja, mereka aktif semua, mereka senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan kepada kita, kepada para kader yang ada di kepengurusan.” Untung Sudjarno S.H. 25 April 2022).

Di dalam AD-ART menekankan bahwa partai dapat menempatkan anggotanya dalam kelompok sosial, organisasi fungsional, dan organisasi profesional yang memiliki filosofi dan ambisi yang sejalan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama. Hubungan organisasi internal partai dengan partai PDI Perjuangan sangat teratur dan tidak mengalami kendala. Sumbangsih dari organisasi sayap maupun organisasi internal memberikan dampak yang baik bagi partai. Badan-badan yang didirikan partai untuk membantu keberlangsungan partai juga merasakan hubungan yang harmonis dengan DPC, Ketua BSPN (Basan Saksi Pemilu Nasional) Kota Semarang mengatakan;

“Selama ini ya tidak ada kendala sih mbak, malah merasa terbantu dengan adanya komunikasi dengan DPC. Kurang lebih ya, berjalan sesuai bagaimana semestinya.” (Didik Setiawan. SE. 13 Desember 2022).

Untuk menjaga keharmonisan hubungan antar organisasi dengan partai, partai mengajak organisasi yang bergerak pada bidang tertentu untuk mengikuti musyawarah pada permasalahan-permasalahan yang memerlukan campur tangan dari organisasi tersebut. Untuk mengedepankan kepentingan partai secara umum, maka organisasi-organisasi yang ada terus aktif hingga

turut menyampaikan pendapat dan menentukan hasil akhir pada musyawarah partai sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## 2. Klientisme Dalam Partai

Basis sosial pendukung partai mendukung partai karena merasa sesuai dengan pola dan arah dari partai tersebut. Apabila hal ini diterapkan dengan benar maka seharusnya klientisme di dalam partai tidak terjadi. Karena pendukung ini benar-benar mendukung sesuai dengan ideologi, pola dan arah dari partai yang didukungnya.

Ideologi yang diterapkan di PDI Perjuangan adalah Pancasila yang mana menjadikan partai ini selalu mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Dalam PDI Perjuangan khususnya di Kota Semarang praktik klientisme sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan, PDI Perjuangan menerapkan penggunaan dana gotong royong untuk kepentingan bersama.

Pada tingkat DPC Kota Semarang, bukti tidak adanya praktik klientisme adalah pada dasarnya mahar politik dalam partai PDI Perjuangan sendiri sudah dihapuskan. Biaya politik yang mahal, ditangani dan ditutup dengan menggunakan dana gotong royong partai. Dana ini dikumpulkan melalui iuran anggota tiap bulan yang ditentukan secara mufakat. Salah satu bakal calon legislatif PDI Perjuangan Kota Semarang yang gagal memenangkan pemilihan menjelaskan;

“Di dalam PDI Perjuangan tidak ada mahar politik, dan kami sadar betul adanya biaya pemilu yang besar. Menanganinya dengan gotong royong iuran anggota. Jadi tidak dibebankan kepada para calon. Apabila dana masih ada, akan dikembalikan kepada partai di tiap daerah untuk keperluan kemenangan pemilu. Seperti kampanye” (Martinus. 24 Desember 2022)

Selain dilihat dari bagaimana partai menyikapi mahar politik, pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada partai pun tidak pernah dengan maksud untuk memberikan keuntungan. Menurut ketua sekretariat DPC PDI Perjuangan bantuan yang diberikan dari pihak luar sangat jarang, umumnya bantuan datang dari para kader. Bantuan yang diberikan juga biasanya akan diberikan kepada masyarakat. Seperti bantuan sembako, bantuan kurban dan sumbangan *ambulance* yang siaga di kantor DPC Kota Semarang.

## C. Derajat Otonomi

### 1. Kemandirian Dalam Pengambilan Keputusan

Seperti yang sudah dijelaskan pada demokrasi internal partai, DPC PDI Perjuangan Kota Semarang senantiasa mengedepankan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Yaitu menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Tapi semua itu kembali lagi pada masalah seperti apa yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan di tingkat DPC Kota Semarang dilaksanakan dengan mekanisme rapat pleno DPC. Rapat pleno ini dipimpin oleh ketua dan sekretaris DPC.

DPC Kota Semarang masih membutuhkan campur tangan DPD maupun DPP, seperti pada penentuan bakal calon legislatif dan penentuan pengurus DPC. Sesuai dengan kebijakan partai PDI Perjuangan sendiri, penentuan dan proses seleksi calon pengurus dimusyawarahkan bersama dalam konferensi cabang. Namun apabila musyawarah yang berlangsung dalam konferensi tersebut tidak mendapatkan hasil akhirnya, hal ini akan diserahkan kepada DPP. Nantinya dengan melihat musyawarah dari konferensi tersebut DPP akan menentukan pengurus DPC. Apabila musyawarah menghasilkan mufakat bersama, berkas hasil akan langsung diserahkan kepada DPP untuk menurunkan surat keputusan bagi para pengurus baru DPC. Hal ini adalah bukti bahwa pengambilan keputusan DPC Kota Semarang masih mendapatkan intervensi dari tingkat yang lebih tinggi.

AD-ART menyebutkan ada lima jenis rapat pada tingkat DPC, berikut adalah jenis rapat beserta aturannya:

#### 1. Konferensi Cabang (Konfercab)

Konferensi Cabang dianggap sah jika setidaknya dua pertiga anggota PAC dan dua pertiga delegasi PAC hadir. Konfercab diselenggarakan di DPC partai dan diketuai oleh DPP dan/atau DPD yang diamanatkan oleh DPP. Badan Partai tingkat kota hadir dalam Konfercab sebagai peninjau berdasarkan undangan dari PAC. Tiap anggota PAC yang menghadiri Konfercab mendapatkan satu hak suara untuk pengambilan keputusan. Ketetapan Konferensi Cabang

yang sifat peraturannya adalah tetap mengikat sampai habis masa berlakunya, sepanjang tidak bertentangan dengan doktrin partai atau norma partai yang lebih tinggi.

## 2. Rapat DPC Partai

Rapat Pleno dan Rapat Bidang adalah dua jenis rapat yang diadakan oleh DPC partai. Sekurang-kurangnya sebulan sekali diadakan rapat pleno untuk membahas hasil Rapat Pimpinan Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan, dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan. Rapat Bidang dilaksanakan minimal dua minggu sekali dan dihadiri oleh Wakil-wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait, dan Wakil Bendahara.

## 3. Rapat Kerja Cabang

Rapat Kerja Cabang adalah rapat DPC Partai dengan PAC, pengurus Badan di tingkat kota, Pengurus Partai di DPRD tingkat pusat provinsi dan kabupaten di daerah pemilihan, Pengurus Partai di lembaga eksekutif tingkat kota, dan undangan DPC Partai lainnya untuk membahas rencana kerja. Partai memeriksa platformnya dan menanggapi berbagai tantangan lingkungan perkotaan. Rapat ini diadakan setidaknya satu kali tiap satu tahun dengan tugas mengevaluasi, mensinkronisasi dan mengkoordinir partai untuk:

- Menerima laporan dan masukan dari Partai PAC mengenai pelaksanaan tugas di daerahnya;
- Memperoleh laporan pelaksanaan dari badan-badan Partai di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan kerjanya;
- Mengkomunikasikan keputusan, instruksi, dan kebijakan Partai berdasarkan umpan balik dan laporan dari Ketua PAC Partai dan Ketua Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

## 4. Rapat Koordinasi Cabang

Rapat ini adalah Rapat DPC yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi pelaksanaan program-program Partai serta

memajukan tujuan, fungsi, dan tugas Partai di wilayah kabupaten/kota. Tujuan pertemuan ini adalah untuk:

- Berbicara tentang sudut pandang yang luas untuk meningkatkan kinerja dan reputasi Partai di semua tingkatan Partai;
- Memeriksa seberapa baik kebijakan dan inisiatif dilaksanakan secara menyeluruh di Partai, di lembaga politik dan publik, di kelompok sayap, dan di komunitas pejuang;
- Membuat kebijakan dan skala prioritas untuk program dan tindakan partai pada semua tingkatan Partai, di organisasi pemerintahan dan politik, serta di kelompok sayap Partai dan komunitas pejuang Partai; dan
- Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan aksi Partai dengan lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai, dan komunitas pejuang Partai.

#### 5. Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang

DPC akan memimpin rapat ini dan wajib dihadiri oleh Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif (anggota DPRD Kota), Lembaga Eksekutif (Walikota, Wakil Walikota, dan Kepala Desa) di tingkat Kota. Disini DPC juga diperbolehkan untuk mengundang PAC dan Ranting sesuai kebutuhan. Rapat yang diadakan dua kali dalam satu tahun ini diadakan untuk membahas mengenai program-program pemerintah di tingkat kota dikoordinasi agar program tersebut tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.

Kemandirian dalam pengambilan keputusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang bisa dikatakan berjalan lancar, namun belum bisa sepenuhnya berjalan sendiri. Intervensi dari tingkat yang lebih tinggi masih mempengaruhi, dikarenakan kebijakan dari partai PDI Perjuangan sendiri sesuai AD-ART yang berlaku. Derajat otonomi dalam DPC Kota Semarang terbilang sudah baik, tidak rendah dan tidak tinggi.

## 2. Kemandirian Keuangan

Sumber dana partai PDI Perjuangan Kota Semarang ada tiga, yaitu; BANPOL (Bantuan Politik), iuran anggota/kader (gotong royong), dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. BANPOL diberikan oleh Pemerintah dan penggunaan BANPOL adalah untuk pendidikan politik dan pembelian keperluan sekretariat yang sudah ditentukan dalam kebijakan penggunaan dana bantuan politik seperti *furniture* kepengurusan, mobil sekretariat, pembayaran listrik, serta keperluan terkait covid-19. Peraturan ini ditetapkan oleh Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor 78 tahun 2020. Pada tahun 2021 PDI Perjuangan mendapatkan bantuan politik sebesar 1,6 Miliar, didapatkan dari jumlah kursi yang berhasil di dapatkan oleh PDI perjuangan.

Satu kursi diberi nilai Rp, 5000,-

Maka perhitungannya adalah,

jumlah suara: 330,891 orang X Rp. 5000,-

hasil: Rp. 1,654,455,000,-

Jumlah suara yang didapatkan PDI Perjuangan dari pemilu 2019.

Iuran anggota, khususnya anggota legislatif maupun eksekutif akan ditentukan melalui mekanisme rapat bersama DPC untuk menentukan nominal iuran dengan tujuan membantu biaya operasional DPC. Apabila kesepakatan sudah tercapai, maka tiap bulannya gaji para anggota tadi akan dipotong sesuai dengan nominal yang sudah disepakati dan diberikan kepada DPC. Iuran anggota legislatif dan eksekutif ini digunakan untuk pembiayaan kebutuhan yang tidak *discover* oleh BANPOL, termasuk pemberian gaji pegawai. AD-ART tidak menyebutkan nominal tetap dari iuran anggota ini, namun AD-ART menetapkan bahwa peraturan partai mengatur iuran dan sarana pengumpulan, pengaturan, dan pengelolannya;

“biasanya itu akan dibahas bersama-sama ya, ketentuan, lalu berapa kira-kira jumlahnya dan itu tidak menentu, disesuaikan kebutuhan juga” (Violita Anggelina chrystie, S.Akun. 13 Desember 2022).

Kemudian sumbangan yang tidak mengikat, yang dimaksud sumbangan tidak mengikat adalah pihak eksternal memberikan sumbangan tanpa adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

AD-ART menjelaskan mengenai kemandirian pengelolaan keuangan yaitu Bendahara Partai bertugas mengawasi keuangan dan aset Partai, yang dikomunikasikan setiap tahun pada Rapat Kerja Partai di levelnya atau atas permintaan dari Ketua Dewan Pengurus Partai di levelnya.

PDI Perjuangan akan menggunakan dana yang didapatkan dari gotong royong atau iuran anggota ketika dihadapkan pada penggunaan dana yang jumlahnya besar. Pada tingkat DPC Kota Semarang, bergotong royong untuk membantu calon walikota yaitu Hendrar Prihardi beserta wakilnya. Kemandirian DPC Kota Semarang dalam mengatur keuangan dapat dikatakan sangat baik dan sudah mapan. Karena tidak bergantung kepada pemerintah, maupun kepada suatu kelompok baik didalam maupun diluar partai. Pendanaan partai yang berdasarkan pada iuran anggota merupakan salah satu tolak ukur dari otonomi keuangan partai yang baik

#### D. Derajat Citra Publik atau Reifikasi (*reification*)

Jika publik dapat mengenali fungsi dan figur partai politik berdasarkan identitas nilai-nilai partai, maka dapat dikatakan bahwa partai tersebut telah melembaga dalam derajat citra publik. Semakin baik citra suatu partai, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya dikenal, namun partai tersebut akan mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal-hal ini dari masyarakat dapat mempengaruhi keberlangsungan partai. Untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, tentu partai harus melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Berikut ini adalah bagaimana PDI Perjuangan Kota Semarang menarik perhatian masyarakat

##### 1. Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Pengetahuan publik terhadap suatu partai dapat diukur melalui bagaimana partai itu berpolitik di tingkat lokal. Salah satu faktor yang

membuat masyarakat mendukung suatu partai adalah karena masyarakat sudah mengetahui keberadaan suatu partai hingga mengetahui bagaimana partai tersebut berkiprah dan merasa sejalan dengan ideologi dari partai tersebut.

PDI Perjuangan Kota Semarang membuktikan kekuatan pendukungnya dengan menjadi partai yang meraih suara terbanyak, dan partai yang menguasai jumlah kursi terbanyak di DPRD Kota Semarang. Tahun 2019 menjadi tahun kemenangan bagi PDI Perjuangan Kota Semarang. Dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Semarang, PDI Perjuangan berhasil menempatkan 19 kadernya. Pada pemilu sebelumnya, tahun 2014 PDI Perjuangan mendapatkan 15 kursi di DPRD Kota Semarang. Jumlah ini juga sudah termasuk jumlah yang tinggi. Tandanya Fraksi PDI Perjuangan di periode sebelumnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan masyarakat semakin banyak memberikan dukungan pada periode setelahnya.

Bukti citra publik dari PDI semakin kuat dengan hasil dari pilwakot 2020. Calon walikota dan wakil walikota (Hendi-Ita) yang diajukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang berhasil membuat sembilan partai yang menduduki DPRD Kota Semarang ikut mendukung calon walikota dan wakil tersebut. Tidak hanya partai itu, partai pendukung seperti PPP, PBB, PKPI, Hanura, Partai Berkarya juga ikut mendukung Hendi-Ita. Hanya ada dua partai yang tidak ikut mendukung calon dari PDI Perjuangan, yaitu partai Perindo dan partai Garuda. Bentuk dukungan yang terlihat jelas adalah tidak adanya calon lain yang berani bersaing dengan calon dari PDI Perjuangan. Sehingga Hendi-Ita harus melawan kotak kosong. Untuk memenangkan kotak kosong, calon tunggal harus mendapatkan suara diatas 50%. Meski ditengah pandemi covid yang masih sangat tinggi, dukungan dari masyarakat Kota Semarang tetap berjalan. Bahkan pasangan Hendi-Ita berhasil mendapatkan suara sebanyak 91, 56% yaitu 716,693 suara. Dengan hasil ini berarti PDI Perjuangan berhasil menjaga kestabilan kesuksesannya.

Setelah terpilihnya Hendi-Ita sebagai Walikota dan wakil walikota Semarang. Mereka terus membentuk citra dengan berbagai kegiatan yang

dilakukan, salah satu yang paling dapat dirasakan adalah perbaikan beberapa wilayah di Kota Semarang. Selain itu ada juga program “Lapor Hendi” yaitu program kerja dimana masyarakat bebas melaporkan berbagai keluhan melalui *platform-platform* yang telah disediakan yang nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh Walikota Semarang. Promosi melalui media sosial, dan berita juga membuat tingkat pengetahuan publik tentang kiprah PDI Perjuangan di Kota Semarang khususnya semakin meningkat.

## 2. Kiprah Partai Dalam Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap partai PDI Perjuangan merupakan salah satu hal penting untuk mengetahui apakah PDI Perjuangan sudah melembaga pada dimensi pengetahuan publik. Selama ini PDI Perjuangan dikenal sebagai partai yang memegang nama “partaine wong cilik” yang berarti partainya orang berderajat rendah (masyarakat kurang mampu). Sebutan ini ternyata mempengaruhi alasan masyarakat untuk memilih serta mendukung PDI Perjuangan. Apabila dilihat dari kiprahnya di dalam politik lokal, dukungan masyarakat kepada PDI Perjuangan terbilang sangat besar. Dengan jumlah pendukung yang besar inilah, Jawa Tengah mendapatkan julukan “Kandang Banteng”.

“Saya dari desa, sampai pindah kesini itu selalu milih PDI. Karena waktu di desa saya ingat ada dewan dari PDI itu memberi bantuan, lalu diberi wejangan oleh orang itu kalau mau bangun negara harus dari rakyat kecilnya dulu. Dari situ saya merasa tertolong, jadi saya ikut PDI terus sampai sekarang. Sekarang partainya juga sudah tambah maju, sampai jadi presiden juga berkali-kali” (Bu Kotim, 54 tahun)

“Waktu jaman masih ada pawai itu, saya ikut pawainya aja wong saya gak mudeng partai. Tapi disitu saya merasa ternyata ikut begini seru. Saya dapat makan, macem-macem mbak. Merasa terbantu aja saya sebagai tambal ban yang pas-pas an gini” (Heru, 45 tahun)

Penanaman citra partai yang berasal dari masyarakat kecil dan partai yang selalu memihak masyarakat kecil, ini ternyata berhasil menghantarkan PDI Perjuangan menjadi partai yang tetap eksis dan menjadi partai dengan jumlah pendukung terbanyak. Selain dari *branding* ini, PDI Perjuangan khususnya di Kota Semarang senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan

untuk terus menarik dukungan publik. Kegiatan menarik perhatian publik tidak hanya dilakukan oleh partai, namun kegiatan dari masing-masing kader juga terus berjalan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contohnya Walikota Semarang Bapak Hendrar Prihadi yang mengadakan kegiatan dengan nama “Lapor Hendi”.

“Karena PDI itu dimata saya apa ya mbak, kelihatan aja gitu mbak kerja nyatanya. Suatu contoh, bapak Ganjar itu kan kelihatan ya aksi-aksinya. Terus Semarang ini kan berubah jadi bagus tatanannya karena pak Hendi mbak, saya kemaren juga milih Pak Hendi lagi” (Hamzah, 22 tahun)

DPC Kota Semarang juga memiliki program untuk mendekatkan partai kepada masyarakat. Program yang dapat menarik perhatian lainnya adalah kegiatan “*Roadshow*”. Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC bersama fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang mendatangi 16 kecamatan untuk melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan pemaparan mengenai PDI Perjuangan beserta hal yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kota Semarang. Selain DPC Kota Semarang, anggota dewan yang duduk di DPRD Kota Semarang juga melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan yang disebut dengan “*reses*”. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Melalui penyerapan aspirasi masyarakat ini lah, PDI Perjuangan terus bergerak untuk membantu kepentingan bersama.

“Pengalaman saya selama ini ya golput aja, tapi semenjak lihat Pak Jokowi, saya jadi milih PDI. Soalnya saya merasa beliaunya itu bagus gitu kinerjanya” (Wahyu, 25 tahun)

“Sebenarnya saya enggak ngerti partai mbak, tapi Pak Jokowi itu terkenal banget, saya ikut-ikutan tetangga aja buat dukung beliau. Orang semua sama saja mbak, masih serba mahal” (Endang, 32 tahun)

Meski dilihat dari citranya PDI Perjuangan terkesan memiliki dukungan yang besar berdasarkan ideologi dan nilai partainya. PDI Perjuangan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat yang memiliki ideologi sejalan. Pengaruh tokoh besar juga mempengaruhi citra dari PDI Perjuangan. Dilantiknya Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia memang memberikan banyak dampak, salah satunya banyak masyarakat yang hanya mengidolakan

tanpa memahami partainya. Apabila banyak masyarakat yang hanya menjadi pendukung satu tokoh saja, dampaknya adalah apabila tokoh tersebut meninggalkan partai, dukungan yang didapatkan juga akan berkurang.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana pelembagaan partai politik di tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Pelembagaan PDI Perjuangan Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Penelitian pelembagaan partai PDI Perjuangan Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, derajat kesisteman PDI Perjuangan Kota Semarang keseluruhannya sudah baik. Di dalam demokrasi internalnya, PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi kebersamaan, dan gotong royong sehingga pengambilan keputusan selalu menggunakan mekanisme musyawarah. Oleh karena itu partai ini adalah partai yang solid tanpa kemunculan faksi. PDI Perjuangan membuka rekrutmen anggota untuk khalayak umum. Namun untuk rekrutmen pengurus dan kaderisasi, PDI Perjuangan menerapkan tahapan-tahapan yang ketat dan konsisten. Berdasarkan penjelasan diatas, maka PDI Perjuangan Kota Semarang pelembagaan PDI Perjuangan Kota Semarang termasuk kuat di bidang kesistemannya.

*Kedua*, basis pendukung partai memiliki hubungan yang sangat baik dengan partai. Tidak hanya organisasi internal saja yang memiliki hubungan baik dengan partai, namun organisasi eksternal juga memiliki hubungan yang baik. Anggota, dan para pendukung partai ini memiliki penanaman ideologi yang kuat sehingga klientisme di dalam partai rendah. Maka PDI Perjuangan Kota Semarang cukup kuat pelembagaannya pada derajat identitas nilai.

*Ketiga*, PDI Perjuangan Kota Semarang sudah kuat pada derajat otonomi. Karena pada kemandirian pengambilan keputusan dan kemandirian dalam pendanaan partai sudah berjalan dengan baik. Campur tangan dari DPD dan DPP dalam pengambilan keputusan oleh DPC hanya mempengaruhi hal-hal yang urgensinya memang membutuhkan persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kebijakan partai. Untuk pendanaan partai, PDI Perjuangan Kota Semarang mengedepankan iuran anggota tanpa bersandar pada suatu pihak mana pun.

*Keempat*, pengetahuan publik terhadap PDI Perjuangan di Kota Semarang cukup lemah. Hal ini dibuktikan dengan kiprah partai di tingkat lokal dan kiprah partai di masyarakat. Dengan *branding* partai serta kerja nyata dari partai dan dewan ternyata belum mampu memberikan citra yang baik pada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengenal dan memilih PDI Perjuangan dikarenakan tokoh-tokoh di dalamnya.

Hasil dari seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa pelebagaan partai di dalam PDI Perjuangan Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya memanfaatkan keadaan sebagai partai yang sedang berada di puncak kejayaan. PDI Perjuangan Kota Semarang juga senantiasa menjaga dan mempertahankan keutuhan partai melalui berbagai kegiatan yang selalu menjunjung kebersamaan dan gotong royong.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah dikenal memiliki pendukung yang kuat, tidak ada salahnya untuk kembali mengenalkan partai kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik untuk masyarakat, dan senantiasa meningkatkan program kerja untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini dilakukan agar, apabila partai ditinggalkan oleh tokoh-tokoh berpengaruh, partai PDI Perjuangan tetap mampu mempertahankan apa yang sudah diraih selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cnnindonesia.com. (2019, 14 Agustus). *PDIP Kuasai Kursi DPRD Kota Semarang*. Diakses pada 17 Januari 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814174415-32-421343/pdip-kuasai-kursi-dprd-kota-semarang>
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadiyah, Dina. 2017. "Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Konstelasi Politik Etnis Tionghoa." *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA' 45 Jakarta*. Vol. 2, No. 2.
- Fadlurrohman, Ahmad Zaki. 2017. "Problem Pelebagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur." *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 2.
- Id.wikipedia.org. (2022, 26 Desember). *Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014*. Diakses pada 17 Januari 2022, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014)
- Jateng.tribunnews.com. (2014, 12 Mei). *KPU Kota Semarang Telah Menetapkan Calon DPRD Terpilih*. Diakses pada 17 Januari 2022, dari <https://jateng.tribunnews.com/2014/05/12/kpu-kota-semarang-telah-menetapkan-calon-dprd-terpilih>
- Lutfi, Muhammad. 2013. "Studi tentang Pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009." *Jurnal Ilmiah Administrasita*. Vol. 2, No. 2
- Mangestuti, Ayu Galuh. 2012. "Pelebagaan Politik Partai." *Universitas Airlangga*. Vol. 1, No. 1.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mohamad, Ali. 2010. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nanang, Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan. 2020. "Pelebagaan Partai Politik: Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019." *Civic Hukum*. Vol. 5, No. 1.
- Prayitno, Budi. 2009. "Pelebagaan Politik PDIP Jateng."

- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, Agung Pratama. 2021. "Pelebagaan Partai Politik Islam di Kota Palembang: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)." *UIN Raden Fatah*. Vol. 1, No. 1.
- Randall, Vicky, dan Lars Svasand. 2002. "Party Institutionalisation in New Democracies." *Party Politics*. Vol. 8, No.1.
- Republika.co.id. (2014, 23 April). *Wow, PDIP Juara di Jateng*. Diakses pada 17 Januari 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/23/n4htuz-wow-pdip-juara-di-jateng>
- Rowdotusya'adah. 2018. "Pelebagaan Partai Politik dan Faksi Intra-partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Ubaningrum dalam Partai Demokrat)."
- Singarimbun, Masri & Sofian, Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Semarang.bisnis.com. (2020, 17 Desember). *Hasil Final Pilkada Kota Semarang, Ini Kata KPU*. Diakses pada 17 Januari 2022, dari <https://semarang.bisnis.com/read/20201217/535/1332322/hasil-final-pilkada-kota-semarang-ini-kata-kpu>
- Setiadi, Fachri. 2019. "Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019."
- Ubaidullah, Mardaya, and Ardiansyah. 2019. "Pelebagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Uinsyah*. Vol.4, No. 4.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Winarti, Novi, and Nazaki. 2019. "Problematika Kelebagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 1.

## LAMPIRAN

Lampiran Foto

Foto 1



Wawancara pertama bersama Ketua Sekretariat DPC PDI Perjuangan  
Kota Semarang

Foto 2



Foto 3



Wawancara bersama Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Wawancara bersama masyarakat Kota Semarang

## Lampiran Dokumen

# AD-ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Masa Bakti 2019-2024



56

ANGGARAN DASAR PDI PERJUANGAN

- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

#### **BAB IV** **KEANGGOTAAN**

##### **BAGIAN PERTAMA** **REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

###### **Pasal 11** **Rekrutmen**

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

ANGGARAN DASAR PDI PERJUANGAN

51

#### **BAB I** **NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.

##### **Pasal 2**

PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

##### **Pasal 3**

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **Pasal 4**

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

#### **BAB II** **ASAS, JATIDIRI, DAN WATAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.

ANGGARAN DASAR PDI PERJUANGAN

57

##### **Pasal 12**

###### **Jenis Keanggotaan**

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota;
  - c. Kader; dan
  - d. Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota Partai mempunyai hak dan kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

##### **Pasal 13**

###### **Anggota Biasa Partai**

- (1) Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat menjadi Anggota Biasa Partai dan Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### **Pasal 14**

###### **Anggota Partai**

- (1) Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pendidikan dan pembinaan Anggota Biasa Partai menjadi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 15

##### Kader Partai

- (1) Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum.
- (2) Jenjang Kader Partai adalah:
- Kader Pratama;
  - Kader Madya; dan
  - Kader Utama.
- (3) Di luar jenjang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Anggota Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### Pasal 16

##### Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasas luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai.

- melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
- menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- membayar iuran wajib Partai; dan
- melakukan rekrutmen anggota baru.

#### BAGIAN KETIGA PENUGASAN ANGGOTA PARTAI

##### Pasal 19

##### Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan

- (1) Anggota Partai dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan alat kelengkapan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan anggota di luar struktur dan alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### Pasal 20

##### Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan, dan penetapan Anggota Kehormatan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### BAGIAN KEDUA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

##### PARAGRAF PERTAMA HAK ANGGOTA

##### Pasal 17

Setiap Anggota Partai berhak:

- mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
- menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- menggunakan hak bicara dalam rapat;
- mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
- memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

##### PARAGRAF KEDUA KEWAJIBAN ANGGOTA

##### Pasal 18

Anggota Partai mempunyai kewajiban:

- memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;

kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.

#### BAB V ORGANISASI

##### BAGIAN PERTAMA STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

##### Pasal 26

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/reroga/ RW atau sebutan lainnya.

- (3) Badan Partai di tingkat Pusat terdiri dari:
- Badan Saksi Pemilu Nasional disingkat BSPN;
  - Badan Pemenangan Pemilihan Umum disingkat BP PEMILU;
  - Badan Legislasi dan Penelitian Partai disingkat BALEGLIT;
  - Badan Pendidikan dan Pelatihan disingkat BADIKLAT;
  - Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat disingkat BBHAR;
  - Badan Penanggulangan Bencana disingkat BAGUNA;
  - Badan Kebudayaan Nasional disingkat BKN; dan
  - Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan disingkat BPEK.
- (4) Badan Partai yang wajib dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang yaitu:
- BSPN;
  - BP PEMILU;
  - BADIKLAT;
  - BBHAR; dan
  - BAGUNA.

#### Pasal 44

##### Badan Saksi Pemilu Nasional

- BSPN melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengorganisasian regu penggerak pemilih (guraklih) dan saksi secara nasional dan permanen.
- BSPN melaksanakan pengawalan dan pengamanan suara
  - Ketua;
  - Wakil-Wakil Ketua Bidang;
  - Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; dan
  - Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara.
- Masa bakti DPD Partai adalah 5 (lima) tahun.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### BAGIAN KETUJUUH DPC PARTAI

##### Pasal 57

- DPC Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di kabupaten/kota.

- Struktur dan komposisi pengurus DPC Partai terdiri dari:
  - Ketua;
  - Wakil-Wakil ketua Bidang;
  - Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; dan
  - Bendahara dan wakil Bendahara;
- Masa bakti DPC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### BAGIAN KEDELAPAN PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI

##### Pasal 58

##### DPLN Partai

- DPLN Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di luar negeri.
- Kedudukan DPLN Partai setara dengan DPC Partai.

#### BAGIAN KEEMPAT KOMUNITAS JUANG

##### Pasal 54

- Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.
- Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

#### BAGIAN KELIMA SATUAN TUGAS PARTAI

##### Pasal 55

- Satuan Tugas Partai yang selanjutnya disingkat Satgas Partai adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai.

- Satgas Partai secara internal menjalankan fungsi keamanan dan protokoler, dan secara eksternal menjalankan fungsi kepanduan.
- Satgas Partai secara terstruktur dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan nama Satgas Cakra Buana.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### BAGIAN KEENAM DPD PARTAI

#### BAGIAN KELIMABELAS HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SEASAS DAN SEASPIRASI

##### Pasal 66

- Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seases dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.
- Penempatan anggota partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

#### BAGIAN KEENAMBELAS LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KERAKYATAN

##### Pasal 67

- DPP Partai dapat membentuk yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kerakyatan guna melaksanakan program kerakyatan Partai.
- Pembentukan yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

#### BAGIAN KETUJUHBELAS URUTAN DAN JENJANG RAPAT

##### Pasal 68

- Urutan dan jenjang rapat-rapat Partai bersifat hierarkis.
- Rapat-rapat terdiri dari:
  - Rapat di tingkat Pusat;

- (7) Rapat-rapat di tingkat Kecamatan terdiri dari:
- Musyawarah Anak Cabang Partai; dan
  - Rapat PAC Partai.
- (8) Rapat-rapat di tingkat Ranting terdiri dari:
- Musyawarah Ranting Partai; dan
  - Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
- Musyawarah Anggota Anak Ranting Partai; dan
  - Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**BAGIAN KEDELAPANBELAS**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

**Pasal 69**

- Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

**Pasal 70**  
**Kongres**

- Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai yang

- Peraturan DPC Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPC Partai atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi.

**Pasal 85**

Ketua Umum Partai dalam rangka menjaga, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Eksistensi Partai memiliki hak menetapkan peraturan-peraturan di luar hierarki aturan partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

**BAGIAN KEDUA**  
**PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARTAI**

**Pasal 86**

- DPP Partai mengesahkan komposisi dan personalia DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPD Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai, serta melaporkannya ke DPP Partai.
- DPC Partai mengesahkan komposisi dan personalia Ranting Partai dan Anak Ranting Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPC Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai, serta melaporkannya ke DPD Partai dan DPP Partai.

**Pasal 74**  
**Konferensi Cabang**

- Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh utusan-utusan PAC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan DPC Partai;
- Konferensi Cabang Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Konferensi Cabang Partai mempunyai wewenang:
  - menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai; dan
  - merumuskan program kerja Partai di tingkat kabupaten/kota;
  - membentuk DPC Partai.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Pasal 75**  
**Rapat DPC Partai**

- Rapat DPC Partai terdiri dari:
  - Rapat Pleno; dan
  - Rapat Bidang.

- Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPC Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**BAB VII**  
**PENDIDIKAN POLITIK**

**BAGIAN PERTAMA**  
**TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK**

**Pasal 87**

- Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:
  - menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno;
  - meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan politik Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**BAGIAN KEDUA**  
**SISTEM KADERISASI**

**Pasal 88**

Kaderisasi Partai

- Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai.

- (2) Kaderisasi partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:
- Kaderisasi Tingkat Pratama;
  - Kaderisasi Tingkat Madya; dan
  - Kaderisasi Tingkat Utama.
- (3) Materi pokok ideologi Partai dalam Sekolah Kader Partai bersumber dari ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**Pasal 89**  
Sekolah Partai

- (1) Dalam rangka kepentingan politik Partai, selain kaderisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), DPP Partai mendirikan Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai.
- (2) Sekolah Partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan.
- (3) Sekolah Kader Partai bertujuan untuk:
- membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
  - mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
  - menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**BAB I**  
KEANGGOTAAN  
**BAGIAN PERTAMA**  
SYARAT KEANGGOTAAN

**Pasal 1**  
Anggota Biasa Partai

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
- (2) Syarat untuk menjadi Anggota Biasa Partai:
- Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
  - bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
  - bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
  - bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
  - bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

**Pasal 2**  
Anggota Partai

- (1) Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan,

**BAB VIII**  
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

**Pasal 90**

- (1) Harta kekayaan Partai terdiri dari:
- Harta bergerak; dan
  - Harta tidak bergerak.
- (2) Harta kekayaan Partai diperoleh dari:
- Uang pangkal dan iuran anggota Partai;
  - Sumbangan yang tidak mengikat;
  - Hibah;
  - Hibah Negara; dan
  - Pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

**BAB IX**  
EVALUASI KINERJA STRUKTUR KEPIMPINAN PARTAI

**Pasal 91**

- (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP Partai.
- (2) DPP Partai secara periodik mengevaluasi kinerja DPD, DPC dan DPLN Partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) DPD Partai mengevaluasi kinerja PAC Partai.
- (4) DPP Partai mengevaluasi kinerja Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai.

pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.

- (2) Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.
- (3) Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.
- (4) Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

**Pasal 3**

- (1) Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
- (2) Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.
- (3) Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
- (4) Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.

**Pasal 4**  
**Kader Partai**

- (1) Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- telah memiliki kematapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
  - telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;
  - telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;
  - memiliki moral yang baik; dan
  - telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, penetapan dan pengangkatan kader Partai diatur dalam Peraturan Partai.

**Pasal 5**  
**Anggota Kehormatan**

- (1) Calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada DPP Partai.
- (2) Kriteria Calon Anggota Kehormatan yaitu:
- tidak berstatus sebagai anggota Partai;
  - berjasa besar dalam upaya kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- (5) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (6) Tugas-tugas Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris DPD Partai sama dengan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Wakil Sekretaris DPD terdiri dari:
- Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - Wakil Sekretaris Bidang Program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan.
- (8) Bendahara DPD bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPD Partai.
- (9) Wakil Bendahara DPD bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.

**BAGIAN KETUJUH**  
**DPC PARTAI**

**Pasal 45**

- (1) Ketua DPC Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
- Kehormatan Partai;
  - Pemenangan Pemilu;

**BAGIAN KEEMPAT**  
**KOMUNITAS JUANG**

**Pasal 42**

- (1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya yang se asas dan se aspirasi serta dipimpin oleh kader Partai.
- (2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan dukungan rakyat kepada partai serta penggalangan pemilih.
- (3) Kepengurusan Komunitas Juang Partai tidak boleh rangkap jabatan dengan kepengurusan struktural Partai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dengan Peraturan Partai.

**BAGIAN KELIMA**  
**SATUAN TUGAS PARTAI**

**Pasal 43**

- (1) Satgas Partai di setiap tingkatan dipimpin oleh seorang Komandan Satgas.
- (2) Komandan Satgas dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Masa bakti Komandan Satgas Partai berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (4) Satgas Partai dalam melaksanakan tugas pengamanan dan protokoler bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

- Ideologi dan Kaderisasi; dan
  - Keanggotaan dan Organisasi.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang:
- Politik, Hukum dan Perundang-undangan
  - Perekonomian, Koperasi dan UMKM; dan
  - Kebudayaan.
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan terdiri dari:
- Penanggulangan Bencana;
  - Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;
  - Kesehatan, Perempuan dan Anak;
  - Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital; dan
  - Pangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (6) Wakil Sekretaris DPC terdiri dari:
- Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
  - Wakil Sekretaris Bidang Program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan.
- (7) Tugas-Tugas Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris DPC Partai sama dengan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga.

**BAGIAN KEDUABELAS**  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PIMPINAN DAN PETUGAS  
PARTAI

**Pasal 51**

- (1) DPP Partai melaporkan harta kekayaan kepada Ketua Umum Partai.
- (2) DPD Partai dan DPC Partai melaporkan harta kekayaan secara tertulis kepada DPP Partai.
- (3) Laporan harta kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya disampaikan secara periodik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai diatur dengan Peraturan Partai.

**BAGIAN KETIGABELAS**  
PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN KEPEMIMPINAN DAN  
KEPENGURUSAN PARTAI

**Pasal 52**

Pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai dilaksanakan apabila suatu Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Partai dalam bentuk:

- a. mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran Partai yang

- (2) Rapat Pleno DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.
- (3) Rapat Pleno DPC Partai dihadiri oleh Ketua DPC Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.
- (5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

**Pasal 70**  
Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah Rapat DPC Partai yang dipertuas untuk membahas rencana kerja Partai, melakukan evaluasi program Partai, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh DPC Partai, Pengurus Anak Cabang Partai, Badan Partai tingkat kabupaten/kota, Petugas Partai dilembaga legislatif tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten di daerah pemilihan tersebut, Petugas Partai di lembaga eksekutif tingkat kabupaten/kota, dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPC Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Rapat Kerja Cabang berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
  - a. menerima laporan dan masukan dari PAC Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

**Paragraf Ketiga**  
Rapat Tingkat Cabang

**Pasal 68**  
Konferensi Cabang

- (1) Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PAC Partai, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAC Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan PAC Partai.
- (2) Hak suara dalam Konferensi Cabang adalah 1 (satu) suara untuk setiap PAC Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Konferensi Cabang dihadiri oleh wakil dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota atas undangan oleh DPC Partai sebagai peninjau.
- (4) Konferensi Cabang Partai diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP Partai dan/atau DPD Partai yang mendapat mandat dari DPP Partai.
- (5) Jumlah utusan PAC Partai di dalam Konferensi Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

**Pasal 69**  
Rapat DPC Partai

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.

- b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota sesuai program kerjanya; dan
- c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua PAC Partai dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

**Pasal 71**  
Rapat Koordinasi Cabang

- (1) Rapat Koordinasi Cabang adalah Rapat DPC Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan untuk:
  - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;
  - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
  - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

**Pasal 72**

Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) DPC Partai dapat mengundang PAC Partai dan Ranting Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Petugas partai di lembaga Legislatif terdiri dari anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

**Paragraf Keempat**

Rapat Tingkat Perwakilan Luar Negeri

**Pasal 73**

Konferensi Perwakilan Luar Negeri

- (1) Konferensi Perwakilan Luar Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PPLN Partai, terdiri dari sekurang-

**BAB III**  
**ATURAN PARTAI**

**Pasal 81**

- (1) Setiap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai wajib disampaikan kepada DPP Partai.

- (2) DPP Partai melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai.
- (3) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai disetujui akan dicatat dan diarsipkan dalam dokumen Partai dan diserahkan kembali kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai untuk ditetapkan, disertai Surat Keputusan DPP Partai tentang persetujuan Rancangan Peraturan Partai.
- (4) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai tidak disetujui akan dikembalikan kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai disertai catatan perbaikan.
- (5) DPD Partai dan/atau DPC Partai wajib melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturannya berdasarkan catatan perbaikan yang diberikan oleh DPP Partai.
- (6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPP Partai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak catatan perbaikan diterima untuk mendapatkan persetujuan DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan

**BAGIAN KEDUA**  
**SISTEM KADERISASI**

**Pasal 84**

Kaderisasi Partai

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai.
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama.
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

**Pasal 85**

Sekolah Partai

- (1) Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
- (2) Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:
  - a. Anggota Partai;
  - b. Kader Partai;
  - c. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - d. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
  - e. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.
- (3) Sekolah Kader Partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada Kader Utama Partai.

**BAB V**  
**PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI**

**Pasal 87**

- (1) Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya.

**Pasal 88**

- (1) Pengelolaan harta kekayaan Partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektifitas penggunaan harta kekayaan Partai.
- (2) Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan diatur dengan Peraturan Partai.

**Pasal 89**

Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya.

## Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang?
2. Ada berapa DPAC PDI Perjuangan di Kota Semarang?
3. Bagaimana struktur kepengurusan dari DPAC tersebut?
4. Ada berapa ranting partai PDI Perjuangan di Kota Semarang?
5. Bagaimana struktur kepengurusan dari anak ranting partai tersebut?
6. Apakah ada organisasi yang mendukung partai PDI Perjuangan khusus untuk DPC Kota Semarang?
7. Organisasi-organisasi apa saja yang mendukung?
8. Seperti apa bentuk dukungan yang diberikan?
9. Apakah organisasi ini memberikan pengaruh terhadap jalannya partai?
10. Sumber dana DPC PDI Perjuangan Kota Semarang didapatkan dari mana?
11. Ketika membutuhkan dana yang besar, bagaimana DPC Kota Semarang menanggulangnya?
12. Bagaimana wewenang DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dalam mengambil keputusan?
13. Bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam DPC PDI Perjuangan Kota Semarang?
14. Bagaimana proses rekrutmen anggota dan pengurus internal partai PDI Perjuangan?
15. Bagaimana proses kaderisasi partai PDI Perjuangan khusus dalam DPC Kota Semarang?
16. Apakah di dalam jalannya kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang pernah terjadi konflik internal hingga menimbulkan suatu perpecahan?
17. Untuk menarik perhatian masyarakat agar mendukung PDI Perjuangan, untuk periode DPC Kota Semarang sudah merancang program kerja apa saja?
18. Program apa saja yang sejauh ini sudah dilaksanakan?
19. Program mana saja yang belum terlaksana?
20. Selain melawan kotak kosong pada pilwakot 2020 kemarin, apa saja hal yang menjadi bukti kekuatan PDI Perjuangan di Semarang?

Pertanyaan kepada masyarakat

1. Apakah anda mengikuti suatu partai? Atau memberikan dukungan suara kepada suatu partai?
2. Menurut anda, seperti apakah partai PDI Perjuangan?
3. Apakah anda merasakan pengaruh dari partai ini?
4. Mengapa anda bergabung bersama PDI Perjuangan?
5. Mengapa anda tidak bergabung bersama PDI Perjuangan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cantika Kurniahati  
TTL : Semarang, 25 Februari 2000  
NIM : 1706016048  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Islam HJ. Sri Anah 1  
SDN Ragunan 14 Pagi  
SMPN 03 Semarang  
SMAN 06 Semarang